

**PERILAKU POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF
STUDI TERPILIHNYA YANDRI SUSANTO
SEBAGAI ANGGOTA DPR RI DAPIL II BANTEN
DI KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG
TAHUN 2014**

**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

RIYAN HIDAYAT

1113112000034



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439H/2018M

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

PERILAKU POLITIK & PEMILU LEGISLATIF : STUDI TERPILIHNYA
YANDRI SUSANTO SEBAGAI ANGGOTA DPR RI DAPIL II BANTEN
DI KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG TAHUN 2014

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 05 Juni 2018



Riyan Hidayat

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Riyan Hidayat
NIM : 1113112000034
Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

**PERILAKU POLITIK & PEMILU LEGISLATIF : STUDI TERPILIHNYA
YANDRI SUSANTO SEBAGAI ANGGOTA DPR RI DAPIL II BANTEN
DI KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG TAHUN 2014**

Dan telah diujikan pada tanggal 05 Juni 2018.

Jakarta, 05 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 19701013 200501 1 003

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 19701013 200501 1 003

**PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI**

**PERILAKU POLITIK & PEMILU LEGISLATIF : STUDI TERPILIHNYA
YANDRI SUSANTO SEBAGAI ANGGOTA DPR RI DAPIL II BANTEN
DI KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG TAHUN 2014**

Oleh

Riyan Hidayat

1113112000034

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 05 Juni 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.

Ketua,



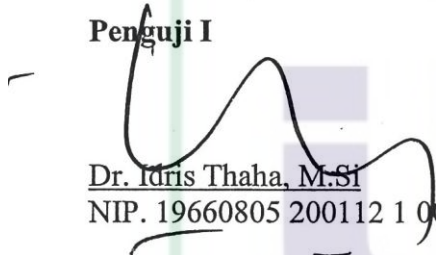
Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 19701013 200501 1 003

Sekretaris,



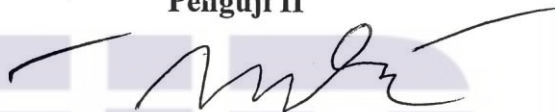
Suryani M.Si
NIP. 19770424 200710 2 003

Penguji I



Dr. Idris Thaha, M.Si
NIP. 19660805 200112 1 001

Penguji II



Adi Prayitno, M.Si
NIP. -

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 12 Juli 2018

**Ketua Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Jakarta**



Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 19701013 200501 1 003

ABSTRAKS

Skripsi ini menganalisa perilaku politik warga pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2014 di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Daerah Pemilihan (Dapil) II Banten Banten atas keterpilihan Yandri Susanto sebagai Anggota DPR RI. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa model perilaku politik warga Kecamatan Ciomas terhadap keterpilihan Yandri Susanto serta faktor apa saja yang paling menentukan keterpilihannya pada Pileg 2014 lalu.

Peneliti menemukan, bahwa kultur komunikasi masyarakat Ciomas masih sangat tradisional, sehingga komunikasi politik terjadi secara hierarkis. Disamping itu, keterpilihan Yandri Susanto sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dari istrinya yang merupakan tokoh dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama di Provinsi Banten. selain itu, ketertarikan masyarakat pemilih terhadap figur dalam hal ini Yandri juga sangat tinggi.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam skripsi adalah perilaku politik yang menggunakan tiga model pendekatan: sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Dari hasil analisa dengan menggunakan tiga model pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterpilihan Yandri Susanto merupakan suatu kesatuan dari tiga model pendekatan tersebut. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa model pendekatan yang paling menentukan dalam menganalisa keterpilihan Yandri adalah pendekatan psikologis khususnya terkait dengan orientasi warga terhadap figur politik.

Kata Kunci : *Perilaku Politik, Pemilu Legislatif, DPR RI*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, syukur senantiasa ku sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Memberikan Jalan kepada setiap hambanya yang berikhtiar dan hanya berpasrah kepadaNya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam pengerjaan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini, tentu penulis melibatkan berbagai pihak. Sehingga, skripsi ini terselesaikan atas bantuan dan dorongan dari mereka semua. Oleh karenanya, penulis berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga segala kebaikan dan bantuan yang mereka lakukan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Mereka itu adalah :

1. Orangtuaku, bak dan umak yang senantiasa menyertakan ridho di setiap langkah hidup yang ku ambil. Dua adik ku, Almarhum. Adi Candra, semoga kau abadi bahagia disana, dan Si Kecil Natasya Ramadhani yang selalu menelpon memberiku semangat. Untuk Ajong dan Akas yang juga senantiasa berharap dan mendoakanku yang terbaik untuk berjuang di perantauan. Semoga kesehatan, rizki manfaat, umur yang panjang dan kebahagiaan senantiasa menyertai kalian.
2. Segenap civitas Akdemika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rektor Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., Dekan Prof. Dr. Zulkifli, MA., Kaprodi Dr. Iding Rosyidin, M.Si yang juga selaku Dosen Pembimbing Skripsiku, Jajaran Dosen tercinta; Dra. Gefarina Djohan M.Si, Suryani M.Si, Adi Prayitno M.Si, Dr. Idris Thaha M.Si, Pak Syakban, Pak Bakir Ihsan, Bu Ana Sabhana Azmy, Pak Nawiruddin, serta seluruh dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis berdoa semoga ilmu- ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah untuk mereka dan UIN Jakara dapat senantiasa

menjadi kampus yang memproduksi insan –insan yang bermanfaat untuk umat.

3. Untuk teman sekaligus sahabat perjuangan hidup, Nur Aisyah Eka Rahmasari, semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus berjuang bersama dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang.
4. Kawan-kawan seperjuanganku yang apapun organisasinya, kita tetap bersama, ku tulis berdasarkan abjad; Aldo Serena, Dendi Budiman, Hendri Satrio, Juansah Wiandy, Luthfi Hasanah Bolqiah, M. Andrian Saefuddin, Travelio R Agusta.
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas masa bakti 2017, Wapres Imam Qolyubi, Sekjend Dekols, Bendum Muray, Suci Ambarwati, Afriliani, Sarah, para ketua bidang dan seluruh pengurus serta seluruh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masa depan yang baik menanti kalian semua.
6. Kawan-kawan organisasi dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Cerita, GRPI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Lampung (HML), Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL 2014), SIMS, IKMS, SPK KIBAR, KAMSRI, FKB Sriwijaya, Aliansi BEM, Sahabat Polisi, PGK, Kopma UIN Jakarta, dan berbagai organisasi lainnya yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas support pengalamannya sejauh ini.
7. Para Senior di Ciputat, Gerry Novandika Age, Sopian Hadi Permana, Rusdy Ali Hanafia, Kuntum Khairu Basa, dan senior-senior lainnya yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejauh ini.
8. Kepada bang Yandri Susanto yang telah memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada bang Bursah Zarnubi, Kapolri Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Edy Soeparno, Ahmad Yohan, Iswari Mukhtar, Mas Ova, Tatang Badru Tamam dan senior lainnya yang telah banyak membantu penulis sejauh ini.

10. Kawan-kawan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatulah angkatan 2013,
terimakasih atas kebersamaannya.

Terakhir, dengan menyadari berbagai kekurangan, penulis menyampaikan
terimakasih atas berbagai masukan krtik dan saran demi perbaikan skripsi ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita. Amin.

Jakarta, 05 Juni 2018

Riyan Hidayat



DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PANITIA SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pernyataan Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Teknik Pengumpulan Data	9
3. Teknik Pengolahan Data	10
4. Teknik Analisis Data	11
5. Metode Penulisan	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP	
A. Konsep Perilaku Politik	13
1. Pendekatan Sosiologis	18

	2. Pendekatan Psikologis	20
	3. Pendekatan Pilihan Rasional	23
	B. Konsep Pemilihan Umum Legislatif	27
BAB III	DESKRIPSI YANDRI SUSANTO DAN KECAMATAN CIOMAS	
	A. Deskripsi Yandri Susanto	33
	B. Profil Kecamatan Ciomas	35
BAB IV	ANALISIS PERILAKU POLITIK WARGA KECAMATAN CIOMAS PADA PILEG 2014	
	A. Model Perilaku Politik Warga Kecamatan Ciomas.....	40
	1. Faktor Sosiologis	43
	2. Faktor Psikologis	47
	3. Faktor Pilihan Rasional	51
	B. Faktor Penentu Keterpilihan Yandri Susanto	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	58
Daftar Pustaka		59

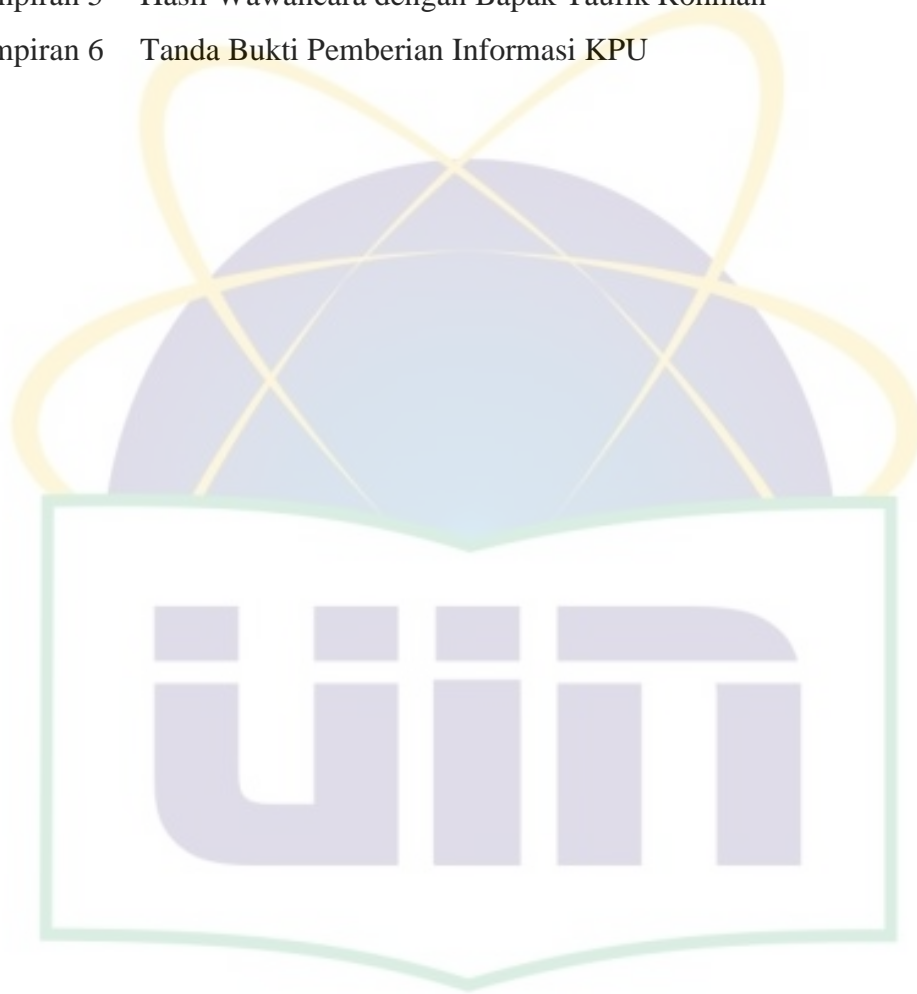
DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1	Hasil Perolehan Suara dan Peringkat Calon Anggota DPR RI pada Pileg Tahun 2014.....	3
Tabel III.B.1	Jumlah Populasi Penduduk Kecamatan Ciomas.....	35
Tabel IV. A.1	Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, dan Hasil Perolehan Suara Yandri Susanto.....	38
Tabel IV. A.2	Perbandingan Perolehan Suara Antar Partai Kontestan Pemilu Legislatif 2014.....	39
Tabel IV.B.3	Perbandingan Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014 dan 2009.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

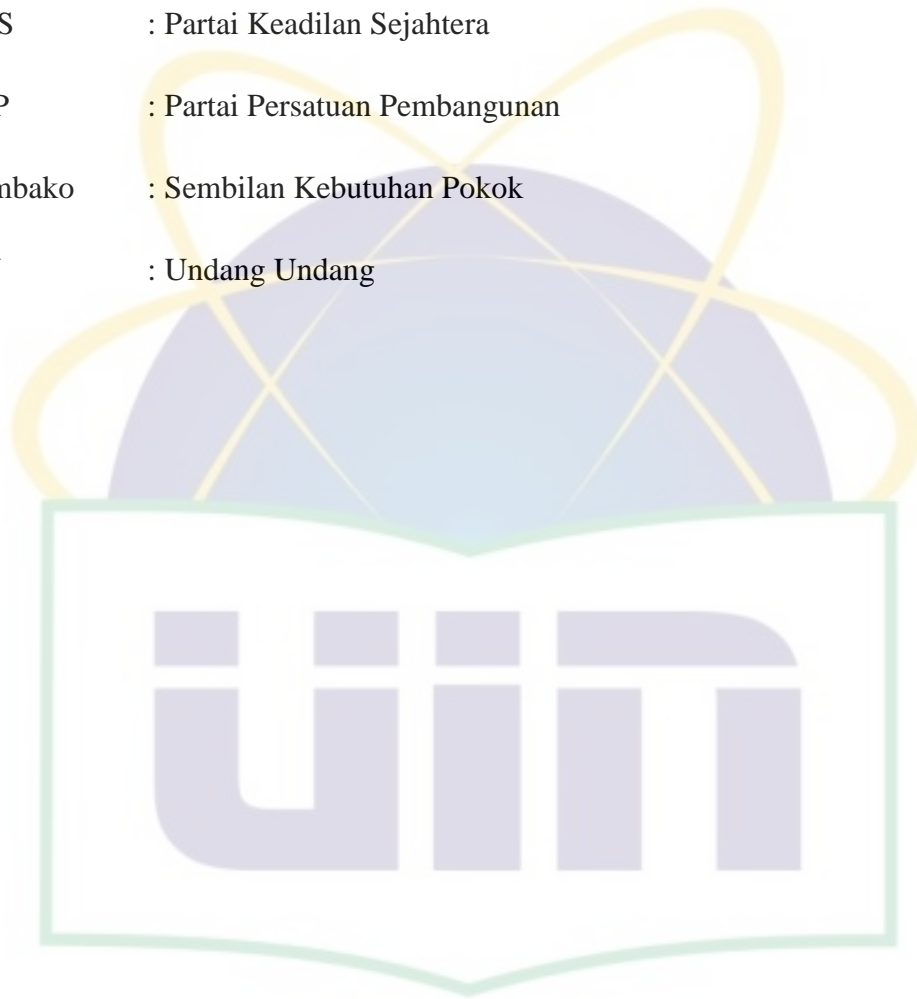
- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Yandri Susanto
- Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Bapak Matlaul Hidayat
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Bapak Haris Munandar
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Suharja
- Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Rohman
- Lampiran 6 Tanda Bukti Pemberian Informasi KPU



DAFTAR SINGKATAN

BM PAN	: Barisan Muda Penegak Amanat Nasional
Caleg	: Calon Legislatif
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Formappi	: Forum Masyarakat Peduli Parlemen
Golkar	: Golongan Karya
Jabodetabek	: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NU	: Nahdlatul Ulama
Orba	: Orde Baru
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PAW	: Pergantian Antar Waktu
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Pemilu : Pemilihan Umum
Pileg : Pemilihan Umum Legislatif
Perludem : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
PKS : Partai Keadilan Sejahtera
PPP : Partai Persatuan Pembangunan
Sembako : Sembilan Kebutuhan Pokok
UU : Undang Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pencalonan anggota legislatif DPR RI yang berasal dari luar daerah (non-putra daerah) merupakan bukan hal yang langka terjadi di Indonesia khususnya dalam konstelasi politik pemilu legislatif. Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas menjadikan para caleg yang berasal dari luar daerah terpilih begitu saja.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2013, 6.550 calon anggota DPR RI masuk dan mendaftar di 77 daerah pemilihan. Namun, mayoritas caleg untuk di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) justru berdomisili di wilayah ini. Menurut Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), “orientasi partai politik masih sangat Jakarta-sentris sehingga partai politik kurang mempromosikan diri ke daerah-daerah. Minimnya caleg yang benar-benar berasal dari daerah pemilihannya sebenarnya justru memperkecil peluang keterpilihan para caleg tersebut. Masyarakat akan kurang mengenal figur caleg yang akan bertarung untuk memperebutkan suara di daerah mereka, apalagi jika caleg tersebut harus bertarung dengan caleg-caleg petahana.”¹

Namun, berbeda halnya dengan fenomena politik yang terjadi di Dapil II Banten. Yandri Susanto² yang memiliki latar belakang non-putra daerah justru sukses mendulang suara terbanyak di dapil ini dengan perolehan 77,964 suara. Sebagai pemegang hasil perolehan suara terbanyak di Dapil II Banten, Yandri, yang saat ini duduk di Komisi II DPR RI, secara individu memiliki latar belakang yang hampir secara keseluruhan memiliki tingkat kemenangan yang tipis untuk

¹ “Minim, Caleg Asli Dapil”, Kompas.com, Jumat 21 Juni 2013.

² H. Yandri Susanto lahir di Palaksiring Bengkulu, 11 Juli 1974. Ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Banten II setelah memperoleh 77,964 suara. Pada periode sebelumnya (2009-2014) Yandri mewakili Dapil Lampung I yang bertugas di Komisi II. <http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef876> diakses pada 09 Januari 2018.

duduk di legislatif mewakili dapil ini. Ia adalah putra daerah asli Bengkulu. Pada periode sebelumnya memegang amanah di DPR RI mewakili Dapil I Lampung.

Selanjutnya, partai yang mengusungnya di Pileg 2014 lalu, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), bukanlah partai “favorit” untuk dapil ini. Mengingat pada periode sebelumnya, PAN tidak memiliki wakil untuk dapil ini bahkan di seluruh dapil yang ada di Banten.³ Hal ini terjadi disebabkan oleh antara lain masyarakat Banten pada umumnya memiliki kultur dan ikatan yang cukup dekat dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan biasanya NU jika diafiliasikan dengan partai, maka rujukannya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁴ Tentu berbeda halnya dengan PAN yang banyak mengidentifikasinya sebagai partai yang memiliki basis Ormas Islam Muhammadiyah.⁵

Menurut Saiful Mujani, basis muhammadiyah yang dimiliki PAN berorientasi di segmen muslim modernis yang umumnya tinggal di wilayah perkotaan. Muhammadiyah memang tidak secara resmi memberikan dukungan terhadap PAN. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga Muhammadiyah yang menjadi pengurus PAN di daerah-daerah. Menurut hal ini di sebabkan karena saat itu pengurus pusat PAN tidak memiliki jangkauan memadai sampai ke daerah-daerah untuk membangun cabang-cabang partai.⁶

Merujuk kepada hasil pemilu legislatif 2014 lalu, dari enam kursi yang tersedia di Dapil II Banten, tercatat ada lima anggota legislatif terpilih yang secara individu berasal dari luar daerah Banten.⁷ *Pertama*, kader Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto memperoleh 77,964 suara. *Kedua*, dari Partai Gerindra, H.

³Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan II Banten kpu.go.id. diakses pada 07 Januari 2018.

⁴“Hasyim Muzadi Kumpulkan 500 Tokoh Nu di Al Hikam, okezone.com, 28 Agustus 2014.

⁵Library.uinsby.ac.id/index.php/news-and-events/604-relasi-pan-dan-muhammadiyah diakses pada 07 Januari 2018.

⁶ Saiful Mujani, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta : Mizan Publika, 2011), 125-126.

⁷ Kabar-Banten.com/news/detail/18973 diakses pada 09 Januari 2018.

Desmond J. Mahesa yang meraih 61,275 suara.⁸ *Ketiga*, Kartika Yudhisti dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 48,377 Suara.⁹ *Keempat*, caleg petahana Dr. Zulkieflimansyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 38,966 Suara.¹⁰ *Kelima*, Ichsan Soelistio dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memperoleh 17,994 suara.¹¹ Artinya, hanya satu putra daerah Banten di dapil ini yang berhasil lolos ke Senayan dengan perolehan 31,668 suara, ia adalah Yayat Y Biaro dari Partai Golkar.¹²

Tabel I.A.1 Hasil Perolehan Suara dan Peringkat Calon Anggota DPR RI pada Pileg Tahun 2014

No	Nama	Nama Partai	Hasil Perolehan Suara
1	Yandri Susanto	Partai Amanat Nasional	77,964 Suara
2	Desmond J. Mahesa	Partai Gerindra	61,275 Suara
3	Kartika Yudhisti	Partai Persatuan Pembangunan	48,377 Suara
4	Dr.Zulkieflimansyah	Partai Keadilan Sejahtera	38,966 Suara
5	Yayat Y Biaro	Partai Golongan Karya	31,668 Suara
6	Ichsan Soelistio	PDI Perjuangan	17,994 Suara

Sumber : <http://ppid.kpu.go.id>

Fenomena terpilihnya anggota DPR RI yang berasal dari luar daerah di Dapil II Banten bukanlah fenomena yang baru. Mengingat pada pileg sebelumnya, yaitu

⁸ Kpu.go.id diakses pada 09 Januari 2018. Desmond J Mahesa merupakan putra daerah Banjarmasin yang pada periode sebelumnya duduk di parlemen mewakili Dapil Kalimantan Timur. (wikidpr.go.id).

⁹ Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef891 diakses pada 09 Januari 2018.

¹⁰ Zulkieflimansyah merupakan putra daerah Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia banyak menghabiskan masa mudanya dengan berkelana menuntut ilmu di berbagai sekolah maupun universitas didalam maupun diluar negeri. Kiprahnya dalam dunia pendidikan cukup mengagumkan. Ia adalah pendiri Universitas Teknologi Sumbawa sekaligus rektor di universitas ini. Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef6fd diakses pada 09 Januari 2018.

¹¹ Ichsan Soelistio merupakan putra daerah yang lahir dan besar di Jakarta serta beralamat tempat tinggal di Jakarta Barat. Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef757 diakses pada 09 Januari 2018.

¹² Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef7ae diakses pada 09 Januari 2018.

pada tahun 2009 pada dapil yang sama, terdapat nama-nama anggota DPR RI terpilih yang berasal dari luar daerah provinsi Banten.¹³ Mereka adalah DR. Zulkiflemansyah berasal dari Sumbawa Besar yang pada periode sekarang juga terpilih kembali, Murdaya Widyawimarta Poo yang merupakan etnis Tionghoa yang berdomisili di Jakarta, dan Adiyaman Amir Saputra yang berasal dari Cirebon.

Dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, isu-isu terkait dengan agama, etnis, golongan dan kedaerahan masih sangat diminati untuk dijadikan gerakan atau strategi menjatuhkan lawan politik.¹⁴ Namun, apa yang terjadi dengan hasil pileg di Dapil II Banten merupakan salah satu aspek langka dalam dinamika primordialisme dan politik yang ada di Indonesia. Lumrahnya masyarakat memilih caleg yang berasal dari daerahnya sendiri atau isu yang sering digaungkan adalah kita harus memilih “putra daerah”.

Menurut Saiful Mujani, pandangan tentang pentingnya perbedaan wilayah atau daerah dalam politik Indonesia tidak berhubungan dengan partisipasi, melainkan pilihan politik. Sarjana ilmu sosial dan politisi Indonesia telah lama meyakini bahwa kedaerahan sangat penting dalam membentuk pilihan politik warga. Dalam sebuah studi komparatif ditemukan bahwa efek suku bangsa atau kedaerahan terhadap perilaku pemilih bahkan lebih kuat dibanding efek kelas sosial.¹⁵

Selain itu, faktor kedaerahan sangat berimpitan dengan suku bangsa. Orang Jawa misalnya, cenderung terkonsentrasi di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Orang Sunda cenderung terkonsentrasi di Jawa Barat dan Banten.¹⁶ Dalam

¹³ Drs. H. Hikmat Tomet (96,446), H. Tubagus Iman Ariyadi (61,648), DR. Zulkieflimansyah (58,478), Murdaya Widyawimarta Poo (20,756), Adiyaman Amir Saputra (26,090), dan Idin Rosyidin (9,168). Data diperoleh dari rekapitulasi hasil pileg 2009 Provinsi Banten www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_11_14_02_09_42_16.%20banten.pdf diakses pada 09 Januari 2018.

¹⁴ Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).

¹⁵ Saiful Mujani, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta : Mizan Publika, 2011), 207-208.

¹⁶ Mujani., *Kuasa Rakyat*, hal.209-210.

studi sosiologi politik di Indonesia, sikap ikatan primordial masih sangat kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, *puritanisme* dan *nonpuritanisme*, dan lain-lain.¹⁷

Fenomena yang terjadi dengan hasil pemilu legislatif di Dapil II Banten sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya menarik untuk diteliti lebih jauh. mengingat dalam dapil ini juga terdapat beberapa nama caleg petahana yang kemudian gagal meraih sukses dalam pileg 2014 lalu.¹⁸ Dan dari lima nama caleg petahana tersebut, hanya Zulkieflimansyah yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI Dapil Banten II.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai perilaku politik masyarakat terhadap caleg yang berasal dari luar daerah, penulis berasumsi bahwa tingginya angka keterpilihan Yandri Susanto di dapil ini layak untuk diteliti khususnya di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Adapun judul penelitian yang dipilih adalah "*Perilaku Politik & Pemilihan Umum Legislatif: Studi Terpilihnya Yandri Susanto Sebagai Anggota DPR RI Dapil II Banten di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2014*".

B. Pertanyaan Penelitian

1. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan fokus terhadap kajian dan pembahasan penulisan skripsi, penulis membatasi pada kajian perilaku politik masyarakat pemilih Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Dapil II Banten tahun 2014 terhadap keterpilihan Yandri Susanto.

¹⁷ Elly M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013) Hal. 124-125.

¹⁸ Pertama, Mamat Rahayu Abdullah. Ia adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar periode sebelumnya yang juga putra daerah Banten. Kedua, Rusli Ridwan, mantan wakil walikota Cilegon tahun 2004. Ketiga, Ahmad Rifai Sufiadi dari partai Demokrat. Keempat, Ichsan Sulistio dari PDI Perjuangan. Kelima, Zulkieflimasnyah dari PKS. m.viva.news.co.id/news/read/492237-peta-kekuatan-caleg-2014-dapil-banten-ii & m.satuharapan.com/index.php?id=148&tx_ttnews%25Btt_news%255D=12904 diakses pada 09 Januari 2018.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah dengan beberapa pertanyaan:

- a) Bagaimana perilaku politik masyarakat pemilih Kecamatan Ciomas pada Pemilu Legislatif DPR RI tahun 2014?
- b) Apa saja faktor yang memengaruhi keterpilihan Yandri Susanto pada Pileg DPR RI 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui perilaku politik masyarakat Kecamatan Ciomas Dapil II Banten pada Pileg 2014.
- b. Untuk memahami faktor apa saja yang memengaruhi keterpilihan Yandri Susanto pada Pileg 2014.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam studi perilaku politik terkait keterpilihan caleg yang memiliki latar belakang non-putra daerah pada pemilu legislatif tahun 2014 Dapil II Banten.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perilaku politik masyarakat dalam pemilu khususnya masyarakat Kecamatan Ciomas (Dapil II Banten).

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan pustaka dan literatur review, ada beberapa skripsi yang menjadi referensi atau acuan dalam penelitian ini *Pertama*, Skripsi Muhammad

Ferdiansyah Zidni¹⁹ yang menggambarkan ketidaksesuaian pendekatan sosiologi dan psikologis dalam memahami perilaku politik warga DKI Jakarta. Sebanyak 65% masyarakat Jakarta menganggap bahwa Gubernur Jakarta nanti tidak harus putra daerah, sedangkan suku Jawa di DKI Jakarta 43,7% memilih pasangan Jokowi-Basuki dan 18,4% memilih Foke-Nara, dan suku Betawi 47,8% memilih Jokowi-Basuki dan 19,7% memilih Foke-Nara, dikalangan umat Islam, Jokowi-Basuki malah unggul 37,9% dan yang memilih Foke-Nara hanya 20,8%. Fenomena yang disebut oleh Ferdiansyah sebagai *anomaly* mengindikasikan bahwa parameter demokrasi tidak hanya institusi atau perilaku terbuka elit namun perilaku rakyat menjadi instrument yang penting untuk menjadi bahan penelitian dalam menjelaskan fenomena yang ada. Skripsi tersebut dilakukan dengan metode penelitian tipe kualitatif dengan cara deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam.

Skripsi diatas memiliki perbedaan dengan apa yang hendak penulis teliti. *Pertama*, tipologi dan keberagaman populasi antara masyarakat Jakarta dan Banten berbeda dimana Jakarta memiliki keberagaman masyarakat yang berasal dari berbagai daerah lebih banyak daripada Banten. Sehingga isu-isu keadaeraan menjadi tidak berlaku di daerah Jakarta. *Kedua*, konteks kajian politiknya pun berbeda, dimana konteks kajian pada skripsi diatas adalah pada pemilihan umum eksekutif, sedangkan yang hendak penulis teliti adalah terkait pemilihan legislatif.

Kedua, Skripsi Ilham Zubairi²⁰ meneliti hal yang sama dengan Ferdiansyah, yakni perilaku politik rasional dengan studi kasus yang berbeda yaitu warga Nahdliyin. Konflik antar elit membuat warga Nahdliyin kebingungan menentukan pilihan politiknya, *impact* yang terjadi adalah mulai munculnya ketidakpercayaan kepada partai politik dan kesadaran untuk menentukan pilihan terhadap calon yang diusung. Fenomena tersebut menepis anggapan perilaku warga Nahdliyin

¹⁹ Muhammad Ferdiansyah Zidni, "Perilaku Pemilih : Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama pada Pemilihan Umum Gubernur DKI 2012", Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

²⁰ Ahmad Ilham Zubairi, "Perilaku Politik Warga Nahdliyin: Studi Kasus Ketidakterpilihannya Kader NU di Pemilukada Kabupaten Lamongan 2010", Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

yang cenderung mengikuti perintah kiyai. Ilham melihat adanya perubahan besar yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu degradasi moral, maraknya transaksional mengakibatkan para Nahdliyin semakin berani melanggar garis-garis yang disepakati dalam berpolitik. Respon warga Lamongan menyadari kepentingan jangka pendek di dunia politik, sehingga penelitian terhadap elit yang dikenal hanyalah mencari popularitas. Konsekuensi garis-garis politik yang dilanggar oleh elit NU justru memperlemah keterikatan dengan pengikutnya, dan pada akhirnya membuat warga Nahdliyin mencari alternatif pilihan politiknya. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penulis beranggapan bahwa skripsi Ilham Zubairi akan menjadi salah satu referensi dimana Kecamatan Ciomas yang berada di Dapil II Banten merupakan wilayah yang didiami oleh mayoritas masyarakat yang berafiliasi dengan NU tetapi justru memilih Yandri Susanto dari PAN yang diklaim banyak berafiliasi dengan Muhammadiyah. Sedangkan terkait perbedaannya ialah terletak pada objek yang diteliti yakni pemilu eksekutif.

Tesis penelitian Benny Nugraha²¹ menemukan bahwa faktor yang paling dominan dalam perilaku memilih kepala daerah secara langsung bagi masyarakat Kecamatan Sokaraja adalah faktor “asal daerah”. Faktor “asal-usul daerah” merupakan salah satu bentuk faktor sosiologis. Akan tetapi, jika ditilik lebih jauh, kita dapat mendekatinya dengan pendekatan sosiologis dan *rational choice*. Namun, tidak dapat didekati dengan pendekatan psikologis.

Tesis Benny Nugraha tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang penulis hendak teliti. Benny menemukan bahwa masyarakat kecamatan Sokaraja lebih mengedepankan faktor asal daerah daripada aspek lainnya. Sedangkan objek penelitian yang hendak penulis lakukan menyatakan bahwa aspek kedaerahan tidak menentukan seseorang dapat terpilih pada pemilu.

Keempat, Skripsi Ignasius Fanmico Simamora²² dengan judul “Sikap Politik Masyarakat Etnis Jawa Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 (Studi Pada

²¹Benny Nugraha, “Perilaku Memilih Kepala Daerah bagi Masyarakat di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung” Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, (2006).

²² Ignasius Fanmico Simamora, “Sikap Politik Masyarakat Etnis Jawa Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 (Studi Pada Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang

Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji). Hasilnya, Masyarakat menunjukkan sikap negatif terhadap calon yang berasal dari etnis Lampung Mesuji yaitu bapak Ganepo. Masyarakat dalam penelitian ini sudah menjadi pemilih rasional yang mana faktor kesamaan paham asal usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikografis tidak menjadi faktor yang signifikan. Analisis kognitif terhadap calon dan pertimbangan logis sangat dominan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Skripsi Fanmico memberikan keterkaitan sekaligus menguji penelitian yang penulis lakukan sejauh mana perilaku politik masyarakat Ciomas berpengaruh pada aspek kesukuan, budaya, agama, asal daerah (sosiologis).

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penulis menganggap model penelitian kualitatif akan mampu menguraikan secara deskriptif terhadap objek yang akan diteliti.²³ Sehingga, hasil penelitian akan mampu menjelaskan keterpilihan Yandri Susanto pada Pileg DPR RI di Dapil II Banten khususnya di Kecamatan Ciomas pada tahun 2014.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, buku, media (cetak/online), karya ilmiah (skripsi, jurnal, dan sebagainya).

b) Wawancara

Kabupaten Mesuji)”, Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016).

²³ Alam, Syamsir dan Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal. 30.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai kasus ini.

Adapun sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.²⁴ *Pertama*, data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang riil dalam berbagai bentuk selain dari hasil wawancara adanya foto kegiatan di lapangan.

Kedua, data sekunder, adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini berasal dari dokumen-dokumen, seperti buku, literatur, jurnal, majalah, koran, dan internet yang dianggap relevan.

3. Teknik Pengolahan Data

Data berarti sesuatu yang diketahui dan dianggap sudah jelas adanya, dengan demikian dapat memberikan gambaran tentang suatu persoalan. Dan data mengenai sesuatu biasanya dikaitkan dengan tempat dan waktu.²⁵ Data yang sudah didapat harus di tata agar lebih rapi dan jelas. Adapun teknik pengolahannya dibuat menjadi dua tahap. Pertama, tahap editing, yaitu kegiatan memeriksa hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kedua, tahap interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil data yang ditemukan.

4. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data, peneliti akan menggunakan metode analisa penelitian secara deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan hal-hal yang menjadi objek penelitian atau menggambarkan suatu keadaan secara tepat,

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 209.

²⁵ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 12.

sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan tersebut. Proses ini terbagi dalam tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁶

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data adalah pemilihan data dengan membuang data yang tidak perlu, data yang di reduksi akan mempermudah peneliti untuk memperoleh gambaran data sekaligus untuk mempermudah dalam menganalisa masalah.

Selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dalam bentuk uraian, penyajian data dalam bentuk tersebut dapat mempermudah peneliti dalam menyusun data sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan.

5. Metode Penulisan

Skripsi ini di tulis dengan berpedoman pada buku *Panduan Penyusunan Proposal & Penulisan Skripsi* yang di terbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan yang mendeskripsikan pernyataan masalah. Penulis mengangkat masalah mengenai perilaku politik masyarakat Kecamatan Ciomas Daerah Pemilihan II Banten atas keterpilihan Yandri Susanto pada Pileg DPR RI tahun 2014. Selanjutnya dalam bab ini penulis menguraikan dua pertanyaan masalah, uraian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori dan Konsep. Dalam bab ini penulis membahas mengenai teori dan konsep perilaku politik dengan tiga model pendekatan, yaitu

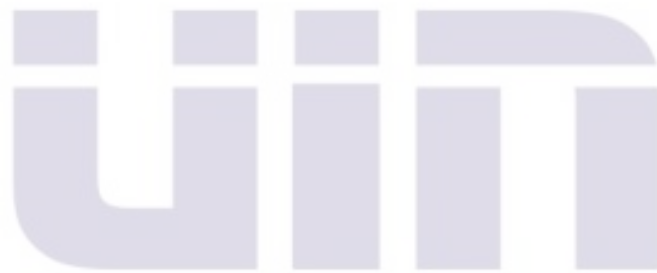
²⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

model pendekatan sosiologis, model pendekatan psikologis, dan model pendekatan pilihan rasional. Bab ini juga menjelaskan konsep Pemilu Legislatif.

Bab III : Deskripsi Yandri Susanto dan Kecamatan Ciomas Dapil II Banten. Bab ini memaparkan biografi Yandri Susanto serta Profil Kecamatan Ciomas Daerah Pemilihan Banten II.

Bab IV : Analisis Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Ciomas Dapil II Banten. Bab ini memaparkan analisa terkait perilaku politik masyarakat Kecamatan Ciomas Dapil II Banten dengan menggunakan tiga model pendekatan (sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional). Selain itu bab ini juga menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pendukung keterpilihan Yandri Susanto.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil kajian dan penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga disampaikan saran yang berkenaan dengan hasil kajian yang penulis lakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Perilaku politik muncul seiring dengan perkembangan behaviorisme yang akarnya dari seorang ahli biologi Ledwig Von Bertalanffy pada tahun 1920.²⁷ Ilmuwan Politik, David Easton, percaya akan adanya keseragaman tertentu dalam perilaku politik yang dapat diekspresikan dalam generalisasi atau teori yang mampu menjelaskan serta meramalkan fenomena politik.²⁸ Di Indonesia, perilaku politik menjadi sebuah primadona baru dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat khususnya ketika musim pemilu tiba.

Pendekatan perilaku politik muncul di Amerika pada tahun 1950-an atau seusai Perang Dunia II. Pendekatan perilaku adalah reaksi terhadap kekurangan dan kelemahan pendekatan tradisional. Adapun alasan penyebab kehadiran perilaku politik adalah *pertama*, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. *Kedua*, ilmu politik tidak mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya komunisme dan fasisme. *Ketiga*, ada kekhawatiran bahwa, jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan tertinggal dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. *Keempat*, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.²⁹ Dalam konsep perilaku politik penulis akan menggunakan tiga model pendekatan yang umum digunakan oleh peneliti dalam menganalisa kejadian-kejadian politik di masyarakat.

Selanjutnya, penulis akan mengemukakan konsep pemilihan umum legislatif secara teoritis dan praktek di Indonesia yang telah menjalani masa perkembangan dari masa ke masa baik itu secara historis maupun secara regulasi.

A. Konsep Perilaku Politik

²⁷ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 57

²⁸ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, 131.

²⁹ Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hal. 41.

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi.³⁰

Baik para *behavioralis* atau *post-behavioralis*, tujuan utama penyelidikan ilmiah sosial adalah untuk menjelaskan perilaku pada tingkat individu dan kelompok, seperti “mengapa individu, aktor institusi, dan Negara berperilaku seperti yang mereka lakukan?”.³¹ S.P. Varma memberikan dua catatan penting, pertama, perilaku politik berorientasi pada nilai atau berusaha untuk mencapai tujuan. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan yang bersifat mengantisipasi.³²

Pendekatan behavioral ingin menjelaskan tingkah laku aktor-aktor politik dan alasan-alasan mereka bertingkah laku seperti itu. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga terdapat pada kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok elit, gerakan nasional, atau masyarakat politik.³³ akan tetapi, untuk menganalisa perilaku suatu organisasi yang perlu di telaah bukan sekedar organisasinya, melainkan latar belakang individu yang peilakunya secara aktual dapat memengaruhi organisasi. Dengan demikian kegiatan kelompok-kelompok kekuatan politik di luar pemerintah dan individu-individu warga negara lebih ditekankan pada aktivitas sumber daya manusianya sebagai pelaku politik.³⁴

Pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. orientasi ini

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 20.

³¹ David Marsh, dan Gerry Stoker (ed.), *Theory and Methods in Political Science* (Newyork: Palgrave Macmillan, 2002). Diterjemahkan oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), 74.

³² Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 87.

³³ Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, 42.

³⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 13.

mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1967), diuraikan sebagai berikut:³⁵

1. Perilaku politik menampilkan keteraturan (*regularities*) yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur atau dkuantifikasikan antara lain melalui statistik dan matematika.
2. Harus ada usaha membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman).
3. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti; setiap analisis harus bebas nilai (*value-free*), sebab benar/tidaknya nilai-nilai seperti demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak dapat diukur secara ilmiah.
4. Penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan teori (*theory building*).
5. Ilmu politik harus bersifat murni (*pure science*); kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) dan menyusun rencana perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu lainnya.

Di Indonesia, perilaku politik sekurang-kurangnya terdapat dua aspek, *pertama*, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu atau pemilihan presiden (*voter turnout*), *kedua*, berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai politik atau calon anggota DPR/DPRD, DPD RI atau calon presiden. Dan empat kriteria yang harus hadir dalam suatu entitas yang disebut partisipasi politik: [1] tindakan, [2] oleh orang biasa, [3] dilakukan secara sukarela, [4] untuk memengaruhi kebijakan

³⁵ "David Easton, *The Current Meaning of Behaviorism in Political Science*" dalam James C. Charlesworth, eds., *The Limits of Behavioralism in Political Science* (Philadelphia: 1962) dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 74-76.

publik.³⁶ Akan tetapi, menurut Ramlan Surbakti, pihak yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan partai politik. Untuk itu menurutnya perilaku politik dibagi dua, *pertama*, perilaku politik lembaga dan pejabat negara yang bertanggungjawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. *kedua*, perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok) yang memiliki hak untuk memengaruhi pihak pertama dalam menjalankan fungsinya, karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik pihak yang kedua yaitu perilaku politik warga negara biasa baik individu maupun kelompok yang disebut dengan partisipasi politik.³⁷

Keikutsertaan warga dalam pemilu demokratis (*voter turnout*) merupakan elemen dasar dari sebuah sistem demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elite untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka menduduki jabatan publik seperti presiden atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dukungan warga tersebut di terjemahkan ke dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum guna memilih orang atau partai untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut.³⁸

Partisipasi politik adalah bagian penting dan sebagai salah satu indikator utama dalam kehidupan politik suatu negara, terutama negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis. Suatu negara bisa disebut sebagai negara demokratis jika negara memberikan ruang partisipasi bagi masyarakatnya. Sebaliknya, warga negara juga sadar dan mau memanfaatkan ruang partisipasi tersebut.³⁹ Partisipasi politik penting karena warga negara telah menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

³⁶ Saiful Mujani, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta : Mizan Publika, 2011), 3-5.

³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 21.

³⁸ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 76.

³⁹ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 175.

⁴⁰ Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015)

Dalam demokrasi, menurut Kenneth Janda,⁴¹ ada dua model partisipasi politik; *pertama*, non-konvensional partisipasi politik, yaitu suatu perilaku yang tidak biasa yang menolak dan menentang institusi yang telah berdiri atau budaya dominan, yang secara personal ditekankan kepada partisipasi untuk menekan nilai atau hal yang berlawanan dengan keyakinan dan keinginan. Partisipasi jenis ini misalnya dengan cara demonstrasi dan menduduki bangunan publik, melukis dengan cat semprot ke dinding berkaitan dengan slogan-slogan politik, menyanyikan slogan-slogan politik dan lain sebagainya. Partisipasi politik non-konvensional ini dilakukan oleh kelompok yang dirugikan yang terpaksa mereka lakukan sebagai pengganti bentuk-bentuk partisipasi yang lebih formal yang dilakukan oleh masyarakat lain.

Kedua, partisipasi politik konvensional, yaitu perilaku rutin yang dilakukan warga masyarakat dalam politik secara formal, seperti berinteraksi dengan parlemen atau pemerintah, mengikuti pemilu seperti kampanye dan memberikan suara kepada calon atau partai. Sifat dasar demokrasi adalah dapat menjamin bahwa masyarakat bisa memengaruhi kebijakan institusi negara secara legal. Tujuan dari sebuah institusi demokrasi adalah untuk menjamin terbentuknya partisipasi politik konvensional. Suatu partisipasi politik dikatakan konvensional jika tidak mengancam dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Terdapat dua macam partisipasi yang konvensional, yaitu aksi yang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan aksi yang dilakukan untuk mengubah atau memengaruhi kebijakan. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional dibagi menjadi tiga tingkatan inisiatif, *low*, *medium*, dan *high*. *Low initiative* adalah seperti memberikan suara pada saat pemilu. *Medium initiative* tindakan seperti mendaftarkan diri sebagai peserta pemilih. Sedangkan *high initiative* adalah dengan mendatangi pertemuan-pertemuan partai, bekerja menjadi tim kampanye atau bekerja di pemerintahan.

⁴¹ Kenneth Janda, Jeffry M. Berry, Jerry Goldman, dan Kevin W. Hula, *Study Guide: The Challenge of Democracy* (Boston: Wadsworth, 2010) 152-164.

Dalam budaya politik, tingkat partisipasi di satu negara dengan negara lainnya relatif berbeda, khususnya antara negara maju, negara berkembang dan negara tertinggal. Almond dan Verba mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga macam; parokial, kaula/subjek, dan partisipan.⁴² Selain itu, Prof. Dr. H. Rusadi Kantaprawira, SH, mengkonstelasikan budaya politik Indonesia meliputi:⁴³

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia
2. Parokial kaula dan partisipan di Indonesia
3. Ikatan primordial yang masih kuat di Indonesia
4. Paternalisme dan patrimonial di Indonesia
5. Problema modernisasi dan tradisi di Indonesia.

Menurut Zainuddin A Rakhman,⁴⁴ secara sosio-kultural, masyarakat Indonesia memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis dalam pola-pola budaya politiknya. Dualisme tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal, yaitu: (1) dualisme antara kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan, (2) dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan, dan (3) dualisme yang merupakan implikasi masuknya nilai-nilai barat di dalam masyarakat Indonesia.

Selanjutnya Ramlan Surbakti⁴⁵ menjelaskan, pendekatan dalam perilaku pemilih dapat dibedakan menjadi lima, yakni:

- Pendekatan struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.

⁴²Tiga jenis budaya politik yang diklasifikasikan oleh Gabriel Almond dan Verba ini sederhananya ingin menunjukkan bahwa terdapat tiga sikap masyarakat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan politik, yaitu: sikap politik yang pasif, pra-aktif, dan pro-aktif.

⁴³ Rusadi Kantaprawira, *sistem politik Indonesia suatu model pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1988), 35.

⁴⁴ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 24-25

⁴⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 145-146.

- Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- Pendekatan psikologi sosial merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

Dalam pendekatan perilaku politik, setidaknya ada tiga model pendekatan seseorang memilih, diantaranya: model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Menurut Dieter Roth, ketiga model pendekatan tersebut saling membangun dan mendasari satu sama lain⁴⁶ sedangkan Saiful Mujani melihat ketiganya tidak mesti bertentangan. Sebaliknya, ketiganya bisa punya pengaruh relatif terhadap pilihan politik. Miller dan Shanks (1996) secara meyakinkan menunjukkan bahwa ketiga model tersebut harus dipahami dalam suatu hierarki pengaruh terhadap perilaku pemilih.⁴⁷

1. Pendekatan Sosiologis

Dalam studi perilaku pemilih, model pendekatan sosiologis adalah yang terawal muncul. Model ini berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih di tentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa⁴⁸.

⁴⁶ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode* (Jakarta: LSI, 2009), 23.

⁴⁷ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 34.

⁴⁸ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 6.

Model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku politik seorang individu merupakan disebabkan oleh determinasi kelompok sosial. Oleh Dieter Roth dikatakan bahwa subkultur tertentu memiliki kondisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.⁴⁹

Menurut Saiful Mujani, faktor-faktor sosiologis dalam model pendekatan sosiologis merupakan komponen yang paling dasar. Di atasnya, identitas partai dapat tumbuh dan berkembang.⁵⁰ Sementara Paul F. Lazarsfeld berpendapat bahwa manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, kerabat, tempat kerja dan sebagainya. Bahwa seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan usianya yang akan memengaruhi keputusan para pemilih. dan setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, sehingga kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun, konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu tersebut menyesuaikan diri. Sebab, pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya.⁵¹

Senada dengan Lazarsfeld, menurut Ramlan Surbakti, pendekatan ini cenderung menempatkan kegiatan pemilih dalam konteks sosial. pilihan seseorang dalam kontestasi Pemilu dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota atau desa), pekerjaan, pendidikan, kelas pendapatan dan agama⁵².

Masih terkait dengan sosial, agama, etnik dan kedaerahan adalah kelompok-kelompok atau organisasi terkait yang punya peran untuk memediasi individu-individu hingga menjadi kekuatan kolektif untuk mendukung partai atau calon tertentu. Organisasi-organisasi ini merupakan sumber daya sosial yang memungkinkan bagi mobilisasi politik. dibanding yang tidak aktif, orang yang aktif dalam suatu organisasi sosial lebih tersedia untuk termobilisasi sehingga bisa

⁴⁹ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*, 23

⁵⁰ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 34.

⁵¹ Paul F Lazarsfeld, Bernard Berelson, & Hazel Gaudet, *The People Choice. How The Voters Makes Up His Mind in a Presidential Campaign* (New York: Tubingen, 1944), 148.

⁵² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 145.

menjadi aktif dalam politik, dan lebih mungkin untuk mendukung partai, calon, atau isu publik tertentu.⁵³

Seorang warga yang terlibat dalam sebuah organisasi jelas membutuhkan keinginan dan sumber daya untuk terlibat. Tetapi, untuk aktif dalam kegiatan politik, harus hadir aspek lain, yakni mobilisasi. Harus ada sekelompok orang yang berkepentingan untuk datang dan meyakinkan bahwa partisipasi mereka dibutuhkan. Kelompok kepentingan, partai, elit politik ini jelas tidak bisa memaksa seorang warga untuk aktif dalam kegiatan politik kalau mereka memang tidak mau atau bahkan tidak bisa. Di samping itu, kelompok kepentingan tersebut tidak bisa dengan mudah datang ke warga untuk meminta mereka aktif dalam suatu kegiatan politik kalau ia tidak berada di dalam jaringan sosial atau jaringan politik tersebut.⁵⁴

Singkatnya, pendekatan sosiologis menempatkan pertimbangan kedaerahan, suku, keagamaan, budaya, kelas sosial, jenis pekerjaan, dan demografis dalam menentukan pilihan politik seseorang dalam pemilu.

2. Pendekatan Psikologis

Model pendekatan psikologis muncul sebagai bentuk respon terhadap pendekatan sosiologis yang di kembangkan oleh *The Survey Research Center, University of Michigan* atau di kenal dengan "*Mazhab Michigan*". Menurut Aminudin, model psikologis percaya bahwa tingkah laku pemilih dapat di deteksi dengan dua konsep. *Pertama*, disebut *political involment*, yakni perasaan penting atau tidak untuk terlibat ke dalam isu-isu politik yang bersifat umum (*general*). *Kedua*, disebut *party identification*, yakni preferensi (perasaan suka atau tidak suka) dari seseorang terhadap satu partai atau kelompok politik tertentu.⁵⁵

Munculnya pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap –secara metodologis- sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi, pendekatan sosiologis umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu

⁵³ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 21.

⁵⁴ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 9.

⁵⁵ Jurnal Aspirasi, *Prilaku Politik di Indonesia*, Vol.1/No.2/Februari 2011, 8.

kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih atau mendukung suatu partai politik tertentu sementara yang lain tidak.⁵⁶

Pertanyaan dari perspektif psikologis terhadap model sosiologis dalam hubungannya dengan pilihan politik adalah bagaimana mekanisme faktor-faktor sosiologis berpengaruh terhadap pilihan politik; bagaimana posisi kelas sosial, agama, kelompok etnik, atau kedaerahan berhubungan dengan keputusan untuk memilih partai politik atau calon pejabat publik tertentu. Faktor-faktor sosiologis tersebut tidak bisa langsung memengaruhi keputusan untuk memilih, tetapi diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai atau calon pejabat publik. Maka yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis yang sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.⁵⁷

Menurut Dieter Roth, pendekatan psikologis berusaha menerangkan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan Pemilu jangka pendek. Pada poinnya, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek, yaitu identifikasi partai, orientasi isu, dan orientasi kandidat.⁵⁸ Menurut Saiful Mujani, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi, karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).⁵⁹

Political efficacy merupakan suatu perasaan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan menentukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik; bahwa dirinya merasa optimis dan kompeten dalam melihat dan menyikapi

⁵⁶ Richard G. Niemi and Herbert F. Weisberg, *Controversies of Voting Behavior*, (Washington D.C : Division of Congressional Quarterly Inc., 1984), 9-12.

⁵⁷ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 25-26.

⁵⁸ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*, 38

⁵⁹ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 22.

masalah-masalah publik yang dihadapi suatu bangsa. Karena merasa bisa memahami dan memengaruhi keputusan-keputusan publik, sekecil apapun, maka seorang warga cenderung melihat makna positif dari keterlibatannya dalam masalah-masalah publik. Warga semacam ini juga optimis dalam melihat pemilu, bahwa pemilu berguna dan positif bagi kebaikan publik. Sikap ini mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut.⁶⁰

Di samping itu, *partisanship* atau identitas partai adalah komponen lain dari *political engagement* yang dipercaya punya pengaruh positif terhadap partisipasi politik. *partisanship* adalah suatu keadaan psikologis, yakni perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia kepada, atau identifikasi diri dengan diri dengan partai politik tertentu. *Partisanship* membentuk sebuah identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikan dirinya dengan sebuah partai politik. karena itu pula, *partisanship* biasa disebut sebagai identitas partai (*party ID*) seseorang. Seorang partisan adalah orang yang merasa dirinya bagian dari sebuah partai atau mengidentikan dirinya dengan partai tertentu. Atau sederhananya orang biasa mengatakan kepada kita misalnya, “saya orang Golkar” atau “saya orang PDIP”.⁶¹

Selanjutnya, orientasi seseorang terhadap isu-isu tertentu juga memengaruhi keputusan seseorang dalam menentukan pilihan politik. dalam jurnal yang berjudul “Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih dalam Dinamika Pemilu 2009” faktor isu menjadi penentu yang paling penting dalam proses keputusan pemberian suara.⁶²

Selain itu opini tentang kualitas kepribadian tokoh-tokoh partai atau calon yang bersaing juga penting dalam memengaruhi pilihan politik seseorang.⁶³ Sebab faktor ketokohan juga akan menentukan sejauh mana kandidat itu dikenal dan dianggap mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga.

⁶⁰ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 24.

⁶¹ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 24-25.

⁶² Agus Setianto Widodo, “Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih dalam Dinamika Pemilu 2009”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.12/No.3/Maret 2009, hal.382 [jurnal on-line]; tersedia di <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10976>; internet; diunduh pada 13 Maret 2018.

⁶³ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 26-27.

Secara konseptual, pendekatan psikologis menempatkan pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilu berdasarkan tiga hal; *pertama*, orientasinya kepada partai politik (*party ID*). *Kedua*, orientasi atau kedekatannya kepada kandidat/personal politisi. *Ketiga*, karena ketertarikannya terhadap isu (orientasi isu).

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Rational choice theory muncul pada akhir tahun 1980 dimana ilmu ekonomi berkespansi ke dalam cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ilmu politik. Teori ini merupakan manifestasi dari adanya pembangunan ekonomi secara besar-besaran. Maka tidak heran apabila ekonomi banyak memengaruhi ilmu sosial lainnya, salah satunya yaitu ekonomi politik. pengikut mazhab ini disebut mazhab virginia atau *virginia school*.⁶⁴

Model pendekatan pilihan rasional menurut Miriam Budiardjo sangat berjasa mendorong usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris yang dapat di buktikan kebenarannya.⁶⁵ Menurut perspektif rasionalitas pemilih ini, seorang warga berperilaku rasional. Yakni, menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Jadi, kalau seorang warga ingin mendapatkan hasil yang sama dari Pemilu, lepas dari ikut ataupun tidak, maka warga tersebut seharusnya tidak ikut Pemilu. Dalam perspektif ini nilai instrumental-lah yang menentukan seorang warga untuk ikut dalam Pemilu.⁶⁶

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan tetapi juga melihat alternatif lain yang menguntungkan. Pemilih di dalam pendekatan ini

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 92.

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 93-95.

⁶⁶ Mujani, *Kuasa Rakyat*, hal. 29-30.

di asumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup.⁶⁷

Menurut Anthony Downs, untuk dapat memperkirakan atau menghitung keuntungan ini, Downs mengistilahkannya sebagai *utility maximation*, pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan partai atau kandidat di masa lalu dan apa yang mungkin dilakukan partai atau kandidat di masa mendatang. Dan pemilih yang rasional membutuhkan informasi yang lengkap. Dengan adanya informasi yang lengkap, alternatif-alternatif pilihan lebih mudah di rumuskan.⁶⁸

Macy dalam buku *Kuasa Rakyat*, seorang penganut *rational choice theory* yang lain, mengusulkan satu solusi yang disebut “model belajar stokastik” dari partisipasi dalam Pemilu dengan asumsi bahwa partisipan adalah orang yang belajar secara adaptif ke pengalaman sebelumnya. Saiful Mujani menyederhanakan model pilihan rasional ini dengan menyatakan bahwa orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang membantu pemilih memenuhi kebutuhan dasarnya.⁶⁹

Dalam buku Ramlan Surbakti, Him Melweit menjelaskan bahwa untuk memengaruhi pemilih rasional, terdapat dua variabel yang harus di miliki oleh seorang kandidat. *Pertama*, kualitas instrumental, yaitu kualitas tindakan yang di yakini pemilih akan di realisasikan oleh kandidat apabila ia menang dalam pemilu. *Kedua*, kualitas simbolis, yaitu keperibadian kandidat yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, kewibawaan, kepedulian, ketaatan pada norma dan aturan.⁷⁰

Menurut Dan Nimmo, pemberi suara yang rasional pada hakikatnya adalah aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara

⁶⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal. 146.

⁶⁸ Anthony Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie, engl: An Economic Theory of Democracy 1957*, (New York: Tubingen, 1968), 26.

⁶⁹ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 32-33.

⁷⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 148.

yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara. Orang yang rasional, yaitu:⁷¹

- Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif.
- Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif yang lain.
- Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif; jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
- Selalu memilih alternatif yang memiliki tingkat referensi paling tinggi.
- Selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama, dan bahwa pemberi suara rasional selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif dengan memilah alternatif itu, yang lebih disukai, sama atau lebih rendah dari alternatif yang lain, menyusunnya dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif tersebut yang peringkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Kenyataan menjelaskan bahwa pemilih rasional banyak tersebar di perkotaan, tingkat pendidikan yang dimiliki serta pemahaman akan politik mempunyai korelasi positif terhadap perilaku pemilih yang semakin rasional. Menurut Saiful Mujani, seorang pemilih akan cenderung memilih partai politik atau kandidat yang berkuasa di pemerintahan dalam pemilu apabila merasa keadaan ekonomi rumah tangga pemilih tersebut atau ekonomi nasional pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebaliknya pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilih jika keadaan ekonomi rumah tangga dan nasional tidak lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk.⁷²

Pertimbangan pokok pada pendekatan pilihan rasional terletak pada kalkulasi untung rugi dalam perspektif pemilih. Pemilih akan meletakkan pilihannya

⁷¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, (Bandung: CV. Remaja Karya, 2008), 148.

⁷² Mujani, *Kuasa Rakyat*, 7.

kepada mereka yang dipercaya akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara ekonomi.

B. Konsep Pemilihan Umum Legislatif

Demokrasi ditandai oleh tiga hal paling mendasar, yakni: 1) kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, 2) partisipasi masyarakat, 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.⁷³ Untuk mengejawantahkan tiga hal tersebut diatas, demokrasi membutuhkan ruang untuk memulainya, bagaimana kemudian kekuasaan itu diperebutkan, atau bagaimana menjaga dan mempertahankan kekuasaan, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, sejauh ini demokrasi mempercayai dengan apa yang dinamakan Pemilihan Umum atau pemilu sebagai wadah untuk berkompetisi dalam demokrasi.

Pemilu merupakan akibat daripada adanya sistem demokrasi. Oleh karenanya mengawali pemahaman terkait sistem pemilu, sebelumnya kita mesti memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*).⁷⁴ Maka hal ini memiliki makna bahwa kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan itu semua demokrasi memberikan kepercayaan bahwa pemilu lah satu-satunya cara untuk bagaimana rakyat mampu berdaulat, setidaknya hingga hari ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilu diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan secara serentak oleh suatu rakyat di suatu

⁷³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi Pertama, 83.

⁷⁴ Istilah terminologis ini diungkapkan oleh Abraham Lincoln (1808-1865), Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lihat A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 190.

negara.⁷⁵ Pemilu merupakan cara terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi modern. Pemilu juga instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, tentu saja dalam teknis pelaksanaannya membutuhkan aturan-aturan yang spesifik, meski demikian pemilu saja bukanlah merupakan suatu jaminan dari demokrasi itu sendiri, akan tetapi pemilu merupakan cara dari didapatkannya legitimasi atas kekuasaan bagi rezim dalam pemerintah.⁷⁶ Oleh sebab itu, dalam Pemilu-lah rakyat dapat memiliki peran yang sangat penting⁷⁷ dalam menentukan masa depan pemerintahan.

Pemilu menurut Lances Castles merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern.⁷⁸ Pada pasal 1 ayat 2 UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Indonesia yang berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” merupakan penegasan akan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, kita dapat menilainya melalui dua sisi yaitu proses serta hasil daripada pemilu tersebut.⁷⁹

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat kebijakan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.⁸⁰ Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi

⁷⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ketiga), (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005), 874.

⁷⁶Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*, 41.

⁷⁷Peran penting rakyat dalam Pemilu merupakan pengejawantahan dari demokrasi yang menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan berada di tangan rakyat, dalam artian dari rakyat (*Government of the people*), oleh rakyat (*government by the people*), dan untuk rakyat (*governmentfor the people*). Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 105.

⁷⁸Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 438.

⁷⁹Abdullah Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1.

⁸⁰Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), 5-6.

perwakilan.⁸¹ Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.⁸²

Pemilu merupakan masa dimana transisi kekuasaan itu dilaksanakan. Oleh karenanya dalam proses konsolidasi demokrasi setidaknya membutuhkan prakondisi yang baik.⁸³ Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat tiga prakondisi demokrasi yang akan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu diantaranya: *pertama*, modernitas dan kesejahteraan. Prakondisi ini diungkapkan secara tegas oleh Seymour M. Lipset bahwa semakin kaya suatu negara, maka semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan kehidupan demokrasi.⁸⁴ *Kedua*, budaya politik, budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai persoalan politik dan peristiwa politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.⁸⁵

Singkatnya, ketika suatu pemilu dilaksanakan, dengan melihat pendekatan ini, kita dapat menilai bagaimana budaya, tradisi, corak perilaku politik masyarakat tertentu. *Ketiga*, Struktur sosial masyarakat, prakondisi dimana eksistensi daripada entitas sosial masyarakat seperti akademisi, profesional, kaum agamawan, dan entitas masyarakat lainnya dapat berperan dengan sebaiknya. Sehingga, kualitas kehidupan berdemokrasi khususnya pada masa pemilu dapat dilihat dari tiga parameter prakondisi tersebut diatas.

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan

⁸¹Srijanti, dkk., *Etika Berwarganegara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) 69.

⁸²Dr. Muhadam Labolo & Teguh Ilham, S.Stp., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), 45-46.

⁸³Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP3i, 2003), 18-19.

⁸⁴Seymour Martin Lipset, *Some Social Requisties of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*, (American Political Science Review, No. 53, 1959),75.

⁸⁵Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 26.

yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁸⁶ Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Secara operasional, pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena “*political market*” yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat individu dan masyarakat untuk saling berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.⁸⁷ Andrew Renolds menyatakan bahwa pemilu merupakan metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan umum diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.⁸⁸

Secara fungsi, menurut Rose dan Mossawir pemilu memiliki beberapa fungsi diantara: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemiliki suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.⁸⁹

Sedangkan secara tujuan, Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa ada tiga tujuan dilaksanakannya pemilu.⁹⁰ *Pertama*, sebagai mekanisme menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang

⁸⁶ Sulastomo, *Democracy atau Democrazy*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 5.

⁸⁷ Muhadam Labolo, *Partisipasi Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 51.

⁸⁸ Andrew Renolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*, dalam Juan J. Linz, dkk, *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001), 102.

⁸⁹ Muhadam Labolo., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 53.

⁹⁰ Ramlan Surbakti dalam Muhammad Aziz Hakim, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, (Jakarta: Tesis UI, 2012), 15.

berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. *Kedua*, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat terjamin. *Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi, tujuan daripada penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu:⁹¹

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sederhananya, hakikat dari sebuah pemilihan umum baik di level pusat maupun daerah bermakna, *pertama*, memperbaharui kontrak sosial. *kedua*, memilih wakil atau pemerintah untuk masa periode lanjutan, sedangkan *ketiga*, harapan baru untuk sebuah kesejahteraan bersama.⁹²

Di Indonesia pertama kali diadakannya pemilu adalah pada tahun 1955 tepatnya pada tanggal 26 September, dimana pada saat itu dilakukannya pemilihan anggota-anggota DPR, sedangkan yang kedua dilakukannya pemilihan anggota-anggota konstituante. Dalam UU No. 12/1949 diamanatkan bahwa pemilu dilakukan bertingkat (tidak langsung), dengan alasan karena warga negara

⁹¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 276.

⁹² Dede Mariana, Caroline Paskarina, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1999), 5.

Indonesia pada waktu itu masih banyak yang buta huruf dan juga menghindari distorsi.⁹³

Selanjutnya ketika parlemen dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1959 melalui Dekrit Presiden, dan negara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi parlementer berakhir. Dalam sistem campuran ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada MPR. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini pemilu tidak pernah dilaksanakan. Hingga kemudian pada tahun 1966 kendali pemerintahan berada dibawah tentara yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, pemilu kedua baru terlaksana pada tahun 1971. Setelah itu pemilu dilakukan secara reguler lima tahun sekali hingga pemilu pada tahun 1997 yang menandai pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Enam kali pemilu di bawah rezim Orde Baru ini bukanlah pemilu yang memenuhi syarat demokrasi melainkan hanya sebagai mekanisme mobilisasi dan pencarian legitimasi secara semu oleh rezim otoriter yang di dominasi oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan Golongan Karya-nya.⁹⁴

Rezim Orde Baru tumbang pada Mei 1998, yang diikuti dengan terbentuknya pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden B.J Habibie. Salah satu agenda utamanya adalah menyelenggarakan pemilu. Tuntutan pemilu ini baru dapat setahun kemudian, yakni pada Juni 1999. Menurut Saiful Mujani pemilu tersebut cukup memenuhi norma-norma pemilu yang demokratis. Pemilu 1999, 2004, dan 2009 seperti halnya pemilu pada tahun 1955. Oleh karenanya bisa dijadikan ukuran sejauh mana rakyat dilibatkan secara demokratis.⁹⁵

⁹³ Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 47-48.

⁹⁴ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 1-2.

⁹⁵ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 2-3.

BAB III

DESKRIPSI YANDRI SUSANTO DAN KECAMATAN CIOMAS

Bab ini akan menjelaskan profil dari Yandri Susanto dan Kecamatan Ciomas sebagai bagian dari penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian terhadap perilaku warga pemilih terkait keterpilihan Yandri Susanto yang berada di Kecamatan Ciomas serta mengidentifikasi Kecamatan Ciomas secara geografis, populasi, tradisi dan kebudayaan, serta keagamaan.

A. Deskripsi Yandri Susanto

Yandri Susanto⁹⁶ adalah anggota DPR RI yang terpilih kembali untuk periode 2014 – 2019. Ia mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Banten II setelah memperoleh 77,964 suara. Yandri ditugaskan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan. Sebelumnya, ia juga pernah dilantik menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014 pada Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Fauzan Syai'e, kader PAN dari Dapil Lampung I yang bertugas di Komisi II.

Pria kelahiran Bengkulu Utara, 7 November 1974 ini menghabiskan masa sekolahnya di wilayah kelahirannya hingga kemudian merantau ke Jakarta dan memulai karir politiknya dengan menjadi kader PAN.⁹⁷ Pada tahun 2004 ia menikah dengan Ratu Rachmatu Zakiyah seorang putri daripada kyai besar di Banten yang saat ini Perempuan yang akrab dipanggil dengan Ratu Zy tersebut adalah Ketua Fatayat NU di Provinsi Banten.⁹⁸

Yandri aktif pula berorganisasi di organisasi sayap muda, Barisan Muda (BM) PAN. Dimulai dengan menjadi Sekretaris Jendral BM PAN periode 2006-2011, Yandri pun dipercaya menempati posisi sebagai Ketua Umum untuk periode 2012-2016.

⁹⁶ <https://tirto.id/m/yandri-susanto-mf> di akses pada 24 Januari 2018.

⁹⁷ <http://www.dpr.go.id/anggota/detail/id/918> di akses pada 24 Januari 2018.

⁹⁸ Fatayat NU merupakan organisasi khusus perempuan Nahdlatul Ulama.

Tidak berhenti di BM PAN, Yandri juga giat di organisasi kepemudaan lainnya yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Alumnus Teknik Pertanian Universitas Bengkulu ini bahkan didaulat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat KNPI periode 2008-2011. Sementara itu, di tahun 2009 Yandri pernah pula menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Selanjutnya, ia dipercaya oleh Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa menjadi Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN. Hingga saat ini, Yandri mengemban amanah sebagai Sekretaris Fraksi PAN di DPR RI.

Dalam perjalanan hidupnya, Yandri yang saat ini juga mengemban amanah menjadi salah satu ketua di DPP PAN, mengukir karirnya dari bawah. Pasca kelulusan sarjana ilmu peternakan di Universitas Bengkulu, ia merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kos yang terletak di Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur. Sejak masa reformasi ia aktif mengikuti ceramah-ceramah Amien Rais yang juga tokoh reformasi tersebut hingga akhirnya ia tertarik dan mendaftar menjadi kader PAN Ranting Rempoa. Setelah itu ia terus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PAN hingga menjadi anggota departemen di DPP PAN.⁹⁹

Suami dari Ketua Fatayat NU Provinsi Banten Ratu Rachmatu Zakiyah atau kerap disapa Ratu ZY ini juga sempat menduduki jabatan Manager Direktur PT Solusi Plus dan Direktur Utama PT Suplai Plus. Selain itu ia juga pernah menjadi Staf Ahli Zulkifli Hasan ketika menjabat Anggota DPR RI dan Menteri Kehutanan pada periode 2004-2009.

Ayah dari tiga anak ini banyak menghabiskan waktunya untuk turun dan terlibat aktif di berbagai kegiatan masyarakat khususnya di dapil tempat dia berada. Menurut Matlul Hidayat, warga Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, Yandri merupakan sosok wakil rakyat yang aktif bersosialisasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Banyak yang mengisukan bahwa Yandri anti *mauludan* karena di usung oleh PAN yang di identifikasi sebagai partainya Muhammadiyah.

⁹⁹ Wawancara bersama H. Yandri Susanto, pada tanggal 19 Februari 2018.

Kenyataan di lapangan justru sebaliknya, Yandri bahkan hampir tak pernah absen menghadiri kegiatan *Maulid* Nabi yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹⁰⁰

Senada dengan itu, tokoh ulama NU H. Muhammad Suharja mengungkapkan bahwa Yandri merupakan sosok wakil rakyat yang mau bekerja dan peduli terhadap masyarakat Ciomas jauh sebelum dirinya mencalonkan diri pada Pileg 2014 bahkan hingga saat ini dirinya telah terpilih. Yandri senantiasa bersilaturahmi dengan pelbagai entitas yang di masyarakat khususnya para ulama.¹⁰¹

Dalam buku *Mozaik Psikologi Politik Indonesia* karya Hamdan Zoelva, ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin *transformational* tidak cukup hanya cerdas, terampil, punya *iniating structure, consideration*, melainkan juga harus kreatif, inovatif, punya visi, ideologi, misi, dan pemikiran-pemikiran strategis kedepan. Warga Desa Pondok Kahuru, Haris Munandar menilai Yandri sebagai anggota DPR RI yang memiliki jiwa kepemimpinan sosial yang tinggi dan tidak lupa kepada rakyat dimana ia di wakili. Seumur hidupnya belum pernah ia temui anggota DPR RI yang mau berkunjung ke rumah-rumah masyarakat dan kadang makan bersama mereka.¹⁰²

Dalam hal kinerja di DPR, Yandri juga aktif dalam menyikapi dan berbicara di media terkait berbagai persoalan bahkan di luar tugasnya sebagai anggota di Komisi II DPR RI.¹⁰³ Di internal Partai Amanat Nasional, Yandri juga di kenal sebagai sosok organisatoris yang ulung dan sebagai “macan-nya” PAN.

Latar belakang istrinya yang sebagian besar adalah pimpinan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, membuat Yandri cukup mudah

¹⁰⁰ Wawancara bersama Matlul Hidayat (warga pemilih Yandri Susanto), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹⁰¹ Wawancara bersama H. Muhammad Suharja (Tokoh Agama), pada tanggal 19 Februari 2018.

¹⁰² Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹⁰³ Salah satunya terkait wacana sertifikasi ulama yang menurutnya itu akan menjatuhkan martabat ulama, lihat <http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef876> di akses pada tanggal 07 Maret 2018.

dikenal oleh masyarakat Dapil II Banten. Dimana ayah dari Ratu Zy merupakan seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup berpengaruh yang bernama Kh. TB. Bai Mahdi Bin Sholeh Makmun. \

B. Profil Kecamatan Ciomas

Ciomas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kecamatan Ciomas memiliki areal seluas 48, 53 Km². Terdiri dari 11 desa, 147 RT dan 49 RW. Kecamatan Ciomas merupakan dataran tinggi yang mempunyai ketinggian wilayah antara 230 s.d 650 M diatas permukaan laut. Lokasi Kecamatan Ciomas secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padarincang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baros.

Kecamatan yang terletak di kaki Gunung Karang ini memiliki tanah yang sangat subur sehingga mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Ciomas per September 2017 berjumlah 42.596 Orang yang terdiri dari 22.353 laki-laki dan 20.243 perempuan serta terkumpul di 12.757 Kartu Keluarga.¹⁰⁴

Tabel III.B. Jumlah Populasi Penduduk Kecamatan Ciomas

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	L-P	Jumlah KK
1	Ujung Tebu	2273	2143	4416	1323
2	Siketug	1531	1397	2928	859
3	Cisitu	1581	1400	2981	885
4	Lebak	2393	2126	4519	1257
5	Citaman	1533	1410	2943	807
6	Pondok Kahuru	2354	2194	4548	1241
7	Sukadana	2848	2673	5521	1482
8	Sukabares	1838	1682	3518	1967

¹⁰⁴ Data diambil dari kantor Kecamatan Ciomas pada tanggal 20 Februari 2018.

9	Sukarena	2299	1964	4263	1126
10	Cemplang	1784	1566	3350	856
11	Pondok Jaya	1921	1688	3609	954
	Jumlah	22353	20243	42596	12757

Sumber : Kantor Kecamatan Ciomas (September 2017)

Masyarakat Ciomas mayoritas beragama Islam bahkan hampir mendekati 100 %. Bahasa yang di gunakan adalah bahasa sunda, Ciomas juga terkenal dengan sunda yang dianggap agak kasar. Namun, kerukunan dan asas kekeluargaan masih sangat melekat dalam tradisi masyarakat Ciomas. Hal ini terlihat dengan aktifnya kegiatan gotong royong dan sikap untuk saling membantu diantara sesama masyarakat. Adapun contoh kongkrit yang sering terlihat dari tradisi positif ini adalah saling membantu saat ada yang menikah, masyarakat beriuran untuk orang yang akan menikah, memberi sumbangan saat ada warga yang terkena musibah, melaksanakan tahlilan saat ada warga yang meninggal serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan ketika muncul konflik antar warga, warga yang lainnya ikut mendamaikan dengan mengadakan kepada tokoh masyarakat agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik.¹⁰⁵

Taufik Rahman menjelaskan bahwa kondisi sosial masyarakat Kecamatan Ciomas sangat bergantung kepada para tokoh masyarakat khususnya kepada para tokoh agama. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi suku dan bahasa mereka terutama sunda, namun tetap menghormati terhadap suku atau bahasa lain diluar mereka.¹⁰⁶

Setiap masyarakat memiliki identitas dan karakteristik budayanya tersendiri. Berbagai perbedaan itu bisa nampak dari bahasa yang digunakan, tradisi yang diwariskan, maupun dari budaya yang membentuk pergaulan dari interaksi antar anggota masyarakat. Untuk memahami budaya dan tradisi suatu suku bangsa

¹⁰⁵ Wawancara bersama Taufik Rohman (Kepala Staf Pemerintahan Kecamatan Ciomas), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹⁰⁶ Wawancara bersama Taufik Rohman (Kepala Staf Pemerintahan Kecamatan Ciomas), pada tanggal 20 Februari 2018.

dengan benar, maka kita harus mengerti tentang seluk beluk masyarakatnya, dan sebaliknya untuk mendapatkan wawasan hakikat kebudayaan dari masyarakat tersebut.¹⁰⁷

Majalah El-Harakah memuat penelitian terkait identitas budaya masyarakat Ciomas, penelitian Ayatullah Humaeni menemukan beberapa karakteristik dan perilaku sosial budaya masyarakat Ciomas yang nampak mudah diamati dan di analisa diantaranya, *pertama*, mereka memiliki karakter yang keras dan berani, hal tersebut kadang tercermin dengan seringnya orang Ciomas terlibat bentrokan dengan sesama warga Ciomas atau dengan warga dari daerah lain. *Kedua*, sarangnya para jawara. *Jawara* adalah mereka yang memiliki keberanian dalam hal fisik yang membuat mereka kerap ditakuti bahkan oleh orang dari luar daerah sekalipun. Kehadiran *jawara* sudah dirasakan sejak zaman kolonial ketika mereka terlibat dalam melakukan pemberontakan terhadap penjajah. *Ketiga*, meskipun kerap ditakuti, jawara sangat menghormati bahkan memuliakan para kyai di Ciomas. *Keempat*, *Golok Ciomas*, senjata tradisional ini merupakan salah satu peninggalan budaya yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Ciomas.¹⁰⁸

Penelitian tersebut diatas juga menjelaskan bagaimana masyarakat Ciomas sangat dekat dengan ritual dan tradisi sosial keagamaan. Catherine Bell dalam bukunya *Ritual Theory, Ritual Practice*, berpendapat bahwa ritualisasi merupakan suatu hal dari beragam strategi yang secara kultural bersifat khusus untuk mengatur beberapa aktivitas berganti dari yang lain, untuk menciptakan dan memberikan hak istimewa bagi suatu perbedaan yang bersifat kualitatif antara *the sacred* (yang suci) dan *the profane* (yang biasa), dan untuk menganggap perbedaan-perbedaan itu berasal dari pemikiran realistik manusia yang melebihi kekuatan-kekuatan manusia sebagai subjek kehidupan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta : Banacipta, 1984), 126.

¹⁰⁸ Ayatullah Homeini, *Identitas Budaya Masyarakat Ciomas Banten*, (el-Harokah Vol 17 No. 2 Tahun 2015), 12.

¹⁰⁹ Catherine Bell, *Ritual Theory, Ritual Practice*, (Oxford : Oxford University, 1992), 74.

Terlepas daripada itu semua, berbagai ritualitas tradisi dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Ciomas selain berkaitan dengan mereka dan PenciptaNya, fungsi yang juga penting adalah bagaimana mereka kemudian dapat menjaga soliditas untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial lainnya dengan baik.



BAB IV

**ANALISIS PERILAKU POLITIK WARGA KECAMATAN
CIOMAS PADA PILEG 2014**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan analisis yang berasal dari data-data yang penulis temukan dilapangan dan teori beserta konsep yang telah penulis kemukakan pada Bab II dan III. Pada bagian pertama bab ini, penulis membahas model perilaku politik warga Kecamatan Ciomas dengan dilanjutkan menggunakan tiga model pendekatan, sosiologis, psikologis, dan *rational choice*. Pada bagian kedua, penulis menjelaskan faktor-faktor penentu dari keterpilihan Yandri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang lalu.

A. Model Perilaku Politik Warga Kecamatan Ciomas

Menurut Miriam Budiardjo, intisari dari perilaku politik yakni partisipasi masyarakat dengan orientasi kepedulian menuju arah yang lebih baik. Indikatornya adalah dengan mengukur intensitas perilaku warga negara dalam pemilu yang diantaranya melalui perhitungan prosesntase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih pemimpin di suatu daerah atau wilayah bahkan sebuah negara.¹¹⁰

Data partisipasi masyarakat Kecamatan Ciomas pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 menunjukkan presentase yang cukup baik. tingkat partisipasi warga Ciomas mencapai 75 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tabel IV. A. 1 Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap, Pengguna Hak Pilih, dan Hasil Perolehan Suara Yandri Susanto

No	Nama Desa	Jumlah Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Pemilih Yandri Susanto
1	Cemplang	2297	1762	127
2	Cisitu	2036	1643	321
3	Citaman	1950	1590	60

¹¹⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 8.

4	Lebak	3029	1980	174
5	Panyauangan Jaya	2206	1551	445
6	Pondok Kaharu	2936	2018	250
7	Siketuk	2088	1635	356
8	Sukabares	2106	1525	404
9	Sukadana	3514	2594	319
10	Sukarena	2850	2253	214
11	Ujung Tebu	3073	2457	695
	Jumlah	28085	21108	3365

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Pusat

Sistem demokrasi mencitakan bahwa perbaikan taraf hidup masyarakat akan terus berubah karena para pemimpin yang tidak mampu mengurus kepentingan rakyat akan di hukum dengan tidak dipilih kembali pada pemilihan selanjutnya. Perpindahan pilihan para pemilih juga sesuai dengan perkembangan isu yang ada, sehingga banyak ditemui peserta pemilu yang tadinya populer menjadi redup. Pengandaian demokrasi adalah tentang partisipasi warga negara dalam semua prosesnya, termasuk pemilihan umum adalah wahana partisipasi paling nyata.¹¹¹

Tabel IV. A. 2 Perbandingan Perolehan Suara Antar Partai Kontestan Pemilu Legislatif 2014

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Suara Caleg Terbanyak
1	PAN	4024	H. Yandri Susanto (3365 Suara)
2	Golkar	2788	Rudy Alfonso, SH, MH (936 Suara)
3	PKB	2646	K.A. Muhaimin Soleh, AB (1968 Suara)
4	PDIP	1704	Ichsan Soelistio (781 Suara)
5	Gerindra	1516	H. Desmond J. Mahesa, SH, MH (524 Suara)
6	PPP	1434	Hj. Kartika Yudhisti, B, Eng, M.Sc (773 Suara)
7	Hanura	996	Hj. Patrika Susana (589 Suara)
8	Demokrat	795	H. Ateng Haerudin (284 Suara)
9	PKS	634	Dr. Zilkieflimansyah, SE, M.Sc (251 Suara)

¹¹¹ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, (Jakarta: RMBOKS, 2009), 84-86.

10	Nasdem	587	H. Mamat R Abdullah (242 Suara)
11	PKPI	212	H. Andy Sujadi, SE, MM, MP (54 Suara)
12	PBB	115	Drs. H. Udja Dhianda (33 Suara)

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Pusat

Hal tersebut di atas senada dengan hasil Pileg DPR RI Dapil Banten II dimana banyak caleg petahana yang gagal terpilih. Diketahui sebelumnya bahwa lima dari enam caleg yang terpilih adalah wajah baru untuk dapil ini. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Dapil Banten II terhadap caleg petahana telah terkikis. Taufik Rohman mengungkapkan bahwa pasca pesta demokrasi tahun 2014 dilaksanakan, khusus di Kecamatan Ciomas, hanya Yandri Susanto yang terlihat aktif turun ke masyarakat secara langsung dan itupun hanya di beberapa desa saja.¹¹²

Demokrasi membutuhkan sikap partisipatif dan pro aktif dari masyarakat, peran itulah yang akan senantiasa menjaga dan membangun jalannya tatanan demokrasi yang baik di sebuah negara. Masyarakat madani adalah ungkapan yang lebih tepat saat masyarakat harus terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan atau tekanan negara, terus meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah sehingga sadar bahwa mereka mempunyai nilai posisi yang kuat ketika berhadapan dengan negara.¹¹³

Masyarakat Ciomas masih merupakan suatu tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai budaya, adat istiadat dan tradisi. Namun, bagi mereka ada yang lebih penting daripada itu semua yaitu kesadaran hidup beragama khususnya Islam yang mampu memberikan rahmat bagi sekalian alam. Sehingga, isu primordialisme dalam politik nyatanya sudah tidak terlalu berlaku. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Ciomas belum sepenuhnya merasakan

¹¹² Wawancara bersama Taufik Rohman (Kepala Staf Pemerintahan Kecamatan Ciomas), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹¹³ A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta : IAIN Press, 2000), 185-186.

kehadiran negara dalam kehidupan mereka, maka yang mereka butuhkan adalah disapa serta dirangkul untuk bersama-sama.¹¹⁴

Bagi masyarakat Ciomas, dapat bertemu langsung dengan pejabat negara baik itu legislatif maupun eksekutif masih menjadi hal yang langka. Sehingga, ketika ada orang, pejabat atau anggota legislatif yang turun dan peduli kepada masyarakat, mereka akan antusias menyambutnya. Tidak cukup sampai disitu, mereka juga merasa perlu untuk langsung dilibatkan agar dapat berpartisipasi aktif. Sehingga, suara mereka tidak sekedar dibutuhkan pada pemilu saja, melainkan pada setiap kebijakan yang menyangkut hajat kehidupan mereka.

Keterlibatan tersebut tentu membutuhkan suatu wadah organisasi yang untuk mendapatkan wadah tersebut mestilah memiliki jaringan. Namun, untuk aktif dalam kegiatan politik, harus hadir aspek lain, yakni mobilisasi. Harus ada sekelompok orang yang berkepentingan untuk datang dan meyakinkan bahwa partisipasi mereka dibutuhkan. Kelompok kepentingan, partai, elit politik ini jelas tidak bisa memaksa seorang warga untuk aktif dalam kegiatan politik kalau mereka memang tidak mau atau bahkan tidak bisa. Di samping itu, kelompok kepentingan tersebut tidak bisa dengan mudah datang ke warga untuk meminta mereka aktif dalam suatu kegiatan politik kalau ia tidak berada di dalam jaringan sosial atau jaringan politik tersebut.¹¹⁵

1. Faktor Sosiologis

Model sosiologis dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih di tentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa. Model sosiologis untuk *voter turnout* telah dikembangkan secara canggih dengan apa yang disebut sebagai model SES (*socio economic status*), lalu disempurnakan dalam apa yang disebut sebagai *Civic Voluntary Model*. Inti dua model ini adalah bahwa seseorang berpartisipasi

¹¹⁴ Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹¹⁵ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 9.

dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya.¹¹⁶ Penulis menemukan beberapa karakteristik masyarakat Ciomas dalam menentukan pilihan politiknya ada pada pendekatan model sosiologis ini.

Pertama, faktor pendidikan, pendidikan merupakan indikator kelas sosial yang diyakini penting untuk menjelaskan pilihan politik disamping partisipasi.¹¹⁷ Matlul Hidayat misalnya, warga pemilih, ia mengungkapkan bahwa kesadaran akan pentingnya arti pendidikan mesti dijadikan salah satu faktor penting dalam memilih calon. Menurutnya, masyarakat kecamatan Ciomas yang kebanyakan berpendidikan rendah mesti di wakili oleh wakil yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup dan tentunya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan masyarakat.¹¹⁸

Banyak studi yang menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan dasar yang kuat atas munculnya sikap kritis terhadap politik. Mereka yang memiliki pemahaman yang baik akan pentingnya pendidikan dalam politik akan tumbuh rasa kesadaran politik yang baik.¹¹⁹ Mereka yang memiliki kesadaran pendidikan akan mampu menilai kinerja calon yang mereka pilih ketika pemilu dan akan menjadi pertimbangan pada pemilu selanjutnya.

Menurut Haris Munandar, Yandri Susanto merupakan sosok yang peduli dan memiliki tindakan langsung terkait persoalan pendidikan. Misalnya ketika Yandri melakukan reses, ia pasti meluangkan waktu untuk mengunjungi dan berdiskusi

¹¹⁶ Saiful Mujani, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta : Mizan Publika, 2011), 6-7.

¹¹⁷ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 233.

¹¹⁸ Wawancara bersama Matlul Hidayat (warga pemilih Yandri Susanto), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹¹⁹ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 234-235.

dengan para guru dan murid-murid di Kecamatan Ciomas kendati Yandri merupakan anggota Komisi II di DPR RI.¹²⁰

Kedua, pekerjaan, status pekerjaan sangat memengaruhi keikutsertaan seseorang dalam pemilu. Mereka yang memiliki pekerjaan akan di sadarkan bahwa apa yang mereka lakukan harus di dukung.¹²¹ Lebih lanjut Matlaul Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya memilih berpartisipasi berdasarkan isu kerakyatan yang dibawa oleh Yandri. Misalnya, mayoritas warga Ciomas adalah petani, misi besar yang dibawa olehnya adalah seputar pertanian dan perkebunan. Langkah kongkritnya kerap kali Yandri turun ke masyarakat ia senantiasa membawa peralatan yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, lebih lanjut kadang Yandri kerap membantu pembangunan akses jalan pertanian dan perkebunan di wilayah Ciomas.¹²²

Wolfinger dan Rosenstone mempertegas bahwa tempat kerja diyakini dapat memengaruhi partisipasi dan pilihan politik. Pekerja pada sektor publik atau pegawai negeri misalnya, diyakini lebih cenderung berpartisipasi dalam politik. tetapi, kaitan antara suatu sektor dengan partisipasi politik bisa bervariasi di setiap negara. Di Amerika Serikat, pekerja sektor pemerintahan dan pemilik tanah pertanian dipercaya lebih berpartisipasi daripada pekerja lain. Pekerja di sektor pemerintahan secara langsung mendapatkan pengaruh dari kebijakan negara, sedangkan pemilik tanah pertanian sangat terkait dengan kebijakan pajak, dan kebijakan ekspor dan impor. Oleh karena itu, mereka lebih sadar dengan dampak kebijakan pemerintah terhadap hidup mereka, sehingga mereka kemungkinan akan lebih aktif dalam politik.¹²³ akan tetapi, penulis menemukan bahwa mayoritas warga Ciomas masih tersandera pada pilihan politik yang sangat di pengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan primer dalam pertaniannya.

¹²⁰ Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹²¹ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 7.

¹²² Wawancara bersama Matlaul Hidayat (warga pemilih Yandri Susanto), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹²³ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 236.

Haris Munandar menambahkan bahwa wakil rakyatnya mestilah seseorang yang memiliki pekerjaan yang jelas. Menurutnya, jangan sampai wakil rakyat yang mereka pilih justru tidak menentu darimana sumber finansialnya.¹²⁴ Dalam kata lain ia juga ingin menjelaskan bahwa wakil rakyatnya haruslah mereka yang sudah memiliki basis modal finansial yang jelas.

Ketiga, keagamaan, masyarakat Ciomas merupakan sebagian besar bahkan hampir seratus persen adalah beragama Islam. Oleh karenanya, anggota DPR yang harus mewakili mereka pun mestilah Islam. Meskipun dalam organisasi keagamaan ia tidak terlalu mementingkan hal tersebut akan tetapi menurutnya, anggota DPR mesti dapat berbaur dan hidup bersama masyarakat, atau sesekali menghadiri kegiatan *maulidan* atau *tahlilan* di masyarakat.¹²⁵

Kegiatan keagamaan masyarakat Ciomas yang khas dengan tradisi-tradisi ala NU membuat siapapun yang mempunyai kepentingan di Ciomas haruslah mengikuti tradisi tersebut. Hal itu pula yang sangat disadari oleh Yandri dalam salah satu strateginya mendekati masyarakat Dapil II Banten meskipun pihaknya kerap diisukan “*anti-maulidan*”. Yandri yang memiliki seorang istri yang merupakan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu temuan kuat bagaimana Yandri sebagai seseorang yang berasal dari luar daerah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Ciomas. Pengaruh istrinya ini juga sekaligus menepis dugaan isu agama yang menyatakan bahwa Yandri adalah seorang yang *anti maulidan*.

Keempat, kedaerahan/kesukuan, Ciomas merupakan suatu daerah dimana suku Sunda menjadi mayoritas disana. Pandangan kedaerahan ini juga sama halnya dengan perbedaan organisasi keagamaan seperti telah tersebut diatas. Yang terpenting dari sekedar isu kedaerahan atau kesukuan bagi masyarakat Ciomas

¹²⁴ Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹²⁵ Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

adalah bahwa caleg harus berdomisili dimana daerah pemilihannya berada. Sebab dengan itulah caleg akan merasa memiliki daerah tersebut.¹²⁶

Lekatnya budaya Sunda yang berkembang di Ciomas juga berkaitan dari bagaimana masyarakat mampu menjaga nilai-nilai tradisi yang ada. Selain ulama, peran *jawara* dalam menjaga tradisi juga berpengaruh dalam menentukan pilihan politik warga di Kecamatan Ciomas.

Analisa tersebut diatas merupakan suatu cerminan pendekatan sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pilihan seseorang dalam ajang pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas pendapatan dan agama.¹²⁷

2. Faktor Psikologis

Pendekatan psikologis membedakan antara kekuatan, arah, intensitas orientasi, baik dalam orientasi isu maupun orientasi kandidat.¹²⁸ Isu-isu khusus hanya dapat memengaruhi perilaku pemilih individu apabila memenuhi tiga persyaratan dasar, *pertama*, isu tersebut harus dapat ditangkap oleh pemilih. *kedua*, isu tersebut dianggap penting oleh pemilih. dan *ketiga*, pemilih harus mampu menggolongkan posisi pribadinya (baik secara positif atau negatif) terhadap konsep pemecahan permasalahan yang di tawarkan oleh sekurangnya satu partai.¹²⁹

Tiga aspek penting yang memengaruhi pemilih psikologis antara lain, keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu,

¹²⁶ Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

¹²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia, 1992), 145.

¹²⁸ Angus Campbell, Gerald Gurin, dan Warren E. Miller, *The Voter Decides*, (Evan-Ston, 1954), 112-143), 112-143.

¹²⁹ Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller, dan Donald E. Stokes et al. *The American Voter*, (New York: Tubingen, 1960), 170.

dan orientasi seseorang terhadap kandidat.¹³⁰ Tiga aspek inilah yang kemudian akan mencoba menganalisa sejauh mana pendekatan psikologis ini mampu menjelaskan keterpilihan Yandri pada pemilu legislatif 2014 lalu.

Pertama, keterpilihan Yandri pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 bukanlah disebabkan oleh Partai Amanat Nasional. Sebab, sejak Orde Baru partai yang berkuasa di Kecamatan Ciomas adalah Partai Golongan Karya (Golkar), bukan PAN. Artinya mayoritas masyarakat Ciomas telah mengidentifikasi dirinya dengan Partai Golkar.

Keterkaitan masyarakat Ciomas dengan Partai Golkar sangat erat sekali. Bahkan Golkar selalu menempatkan kadernya di DPRD tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sejak masa Orde Baru hingga tahun 2014 lalu. Hal ini disebabkan oleh kekuatan Golkar yang mampu mnrmpatkan kadernya dengan baik dan mampu mengkonsolidasikan para tokoh masyarakat di Ciomas yang sebagian besar memang berasal dari kelompok ulama atau kyai tradisional.

Tabel IV.B.3 Perbandingan Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014 dan 2009

Hasil Pileg 2014			Hasil Pileg 2009		
NAMA	PARTAI	SUARA	NAMA	PARTAI	SUARA
Yandri Susanto	PAN	77,964	Hikmat Tomet	GOLKAR	96,446
Desmond J. M	GERINDRA	61,275	Tb Iman Ariyadi	GOLKAR	61,648
Kartika Yudhisti	PPP	48,377	Zulkifliemansyah,	PKS	58,478
Zulkieflimansyah	PKS	38,966	Adiyaman Amir S	DEMOKRAT	26,090
Yayat Y Biaro	GOLKAR	31,668	Murdaya Widya Wimarta Poo	PDIP	20,756
Ichsan Soelistio	PDIP	17,994	Idin Rosyidin	GERINDRA	9,168

Sumber : <http://ppid.kpu.go.id>

Menurut William Lidle, ada empat segi kehidupan partai politik yang berhubungan dengan primordialisme serta berdampak besar untuk menyalurkan

¹³⁰ Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPPR) Sulawesi Selatan, “Laporan Riset Perilaku Pemilih di Kabupaten Barru”, 2015, hal. 14. [jurnal on-line]; tersedia di www.kpu.go.id/koleksigambar/perilaku_memilih_barru_sulsel.pdf.; di unduh pada 05 Maret 2018.

aspirasi rakyat dalam memengaruhi pengambilan keputusan.¹³¹ *Pertama*, basis-basis pilihan partisan yang bersifat inklusif dan eksklusif yang timbul dari kelompok primordial. Mayoritas warga Kecamatan Ciomas merupakan corak masyarakat yang secara keagamaan politik bersifat eksklusif dan secara kepartaian bersifat semi inklusif. Sebab ketika ditanya soal kepartaian mereka lebih familiar dengan Golkar. Akan tetapi, persoalan figur mereka sangat inklusif.

Kedua, asal muasal sosial dari pimpinan partai yakni dari elit tradisional dan modern. Sistem politik yang berjalan di Kecamatan Ciomas merupakan perpaduan antara elit tradisional dan moderen. Kondisinya menggambarkan bahwa elit moderen yang diisi oleh kader partai mesti mampu merangkul suara elit tradisional yang di dominasi oleh para kyai dan jawara.

Ketiga, kukuhnya ikatan partisan. Ikatan politik warga Ciomas dengan partai sebenarnya tidak terlalu erat. Sebab warga lebih tertarik dengan ketokohan daripada sekedar kepartaian. *Keempat*, ciri internal partai seperti organisasi massa atau organisasi kader. Peran warga Ciomas dalam kaitannya dengan partai politik belum sampai kepada level peranan yang dilakukan kader pada partai politik. sistem kepartaian hadir sebagai pengumpul masa demi meraup suara warga pemilih sebanyak-banyaknya.

Kedua, warga masyarakat Ciomas sangat di dominasi dengan isu-isu keagamaan. Hal ini disebabkan oleh kultur masyarakatnya yang religius tradisional. Yandri yang sebelumnya diusulkan sebagai calon anggota DPR yang anti *maulidan* karena memiliki latar belakang Partai Amanat Nasional yang di identifikasi dengan kelompok organisasi keagamaan Muhammadiyah sempat menjadi stigma di kalangan masyarakat. Akan tetapi, Yandri menepis stigma yang dimanfaatkan lawan-lawan politiknya dengan senantiasa hadir pada kegiatan-kegiatan keagamaan *ala* NU.

¹³¹ R. William Lidle, *Partisipasi & Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*, (Jakarta : PT Temprint, 1992), 20-21.

Apa yang dilakukan oleh Yandri ternyata diamini oleh masyarakat Ciomas. Menurut salah satu tokoh ulama di Ciomas, ia mengungkapkan bahwa banyak mereka yang mengatasnamakan kader NU akan tetapi perannya tidak ada untuk NU. Menurutnya, Yandri adalah sosok wakil rakyat yang tidak sekedar mengaku kader NU melainkan juga peduli terhadap kegiatan-kegiatan dan perjuangan NU.

Senada dengan itu, menurut Gus Sholah, Tokoh NU harus mampu menjembatani lintas partai demi memperjuangkan masyarakat yang pasti sebagian adalah warga NU, terlibat dalam dunia politik tidak mutlak dilarang asalkan bertujuan politik kebangsaan yang membela nasib rakyat lemah bukan mencari kekuasaan. Para tokoh NU diharapkan mampu menyadarkan warganya, bahwa jangan sampai menjadi komoditas yang hanya diperlukan suaranya saat pemilu tiba. Menjadi pemilih cerdas harusnya sebagai tuntutan yang memperjuangkan kepentingannya selama lima tahun, hal ini akan menjadi sumbangsih besar bagi pembangunan bangsa serta pengembangan pembinaan agama Islam dalam konteks *muamalah*.¹³²

Singkatnya, bagi masyarakat NU di Kecamatan Ciomas, yang terpenting dari sebuah politik itu adalah siapa yang mau dan bisa memperjuangkan NU. Bukan sekedar mengaku namun tidak ada kiprahnya untuk keberlangsungan dan perkembangan masyarakat NU.

Ketiga, mengenai orientasi warga terhadap kandidat. Yandri merupakan salah satu kandidat yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat. Sejak dirinya menikah dengan Ratu ZY yang merupakan putri dari tokoh NU Banten, Kh. TB. Bai Mahdi Bin Sholeh Makmun, dirinya sudah mulai bersosialisasi dan kerap bersilaturahmi dengan masyarakat Banten. Puncaknya, pada tahun 2013 Yandri memutuskan untuk memilih Dapil II Banten sebagai tempat dimana ia harus bertarung memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹³³

¹³² Salahuddin Wahid, dkk, *Menggagas NU Masa Depan*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010), 100-102.

¹³³ Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

Pengaruh Ratu Zy sebagai seorang istri dari Yandri juga menjadi alasan kuat bagaimana masyarakat bisa menerima dengan cepat dan baik kehadiran Yandri. Dimana posisi Ketua Fatayat NU yang diemban istri Yandri sekaligus membatalkan dugaan anti *maulidan* yang diisukan kepadanya. Orang tidak lagi melihat Yandri sebagai sosok yang tunggal akan tetapi sudah menjadi bagian keluarga besar NU di Banten. Hal ini pula lah yang menguatkan orientasi masyarakat terhadap kandidat menjadi hal penentu dalam kaitannya keterpilihan Yandri Susanto pada dapil ini.

Selain itu, dalam berbagai kesempatan sebelum pileg 2014, masyarakat mengenal Yandri sebagai menantu daripada Kh. TB. Bai Mahdi Bin Sholeh Makmun. Sejak saat itulah dirinya banyak diundang oleh tokoh-tokoh ulama NU di Dapil II Banten dalam berbagai kegiatan untuk memberikan pidato atau sambutan dalam kaitannya dengan tahap pengenalan Yandri kepada masyarakat.

Pola komunikasi politik Yandri yang persuasif dan akomodatif membuat warga tertarik dengan sosok Yandri Susanto. Selain itu, faktor keagamaan ala NU yang dimunculkan oleh Yandri juga menjadi jembatan untuk Yandri agar dapat terpilih menjadi anggota DPR.

Yandri yang senantiasa menghadiri berbagai undangan kegiatan dari warga Ciomas telah membedakannya dengan caleg-caleg DPR RI yang lainnya. Matlaul Hidayat mengungkapkan bahwa gaya komunikasi politik seorang Yandri sangat egaliter. Ia tidak membedakan mana petani, pejabat, bahkan pengangguran sekalipun. Sikap *low profile* inilah yang disukai oleh masyarakat.¹³⁴ Sehingga, tidak heran faktor utama keterpilihan Yandri kaena sosoknya yang populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi di Ciomas.

3. Faktor Pilihan Rasional

Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009 di Dapil II Banten tidak berbanding lurus atau sama dengan hasil pileg tahun 2014, dimana lima dari enam

¹³⁴ Wawancara bersama Matlaul Hidayat (warga pemilih Yandri Susanto), pada tanggal 20 Februari 2018.

anggota DPR yang berhasil melenggang ke Senayan merupakan wajah baru untuk dapil ini. (lihat tabel IV.B.2 Perbandingan Hasil Perolehan Suara Pileg 2014 dan 2009).

Dalam pembahasan terkait karakteristik kelompok pemilih rasional, motif utamanya ialah kepentingan ekonomi. Model rasionalitas pemilih bertumpu pada keyakinan bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang punya kepentingan untuk dirinya secara material. Perilakunya didorong oleh motif kepentingan material dirinya. Atas dasar itu perilaku politik seorang pemilih, termasuk pilihan politik, didorong oleh kepentingan ekonomi pemilih. setidaknya motif ekonomi adalah motif yang paling utama dibandingkan motif-motif lain. Singkatnya, ada keyakinan bahwa pemilih menghitung atau mempunyai kalkulasi untung rugi dalam menentukan pilihan tersebut.¹³⁵

Rasionalitas pemilih bertautan dengan isu yang dirasakan paling mendesak atau paling penting bagi pemilih. ketika berbicara tentang isu, secara umum ada dua jenis: isu simbolik atau identitas dan isu teknis.¹³⁶ Isu simbolik berkaitan dengan identitas kelompok sosial yang maknanya bersifat intrinsik dan asli (bawaan), bukan instrumental, dan hanya bermakna bagi kelompok bersangkutan. Perdebatan dan persaingan dalam pemilu kemudian menjadi eksklusif pada kelompok bersangkutan sebab tidak mampu mengakomodasikan kepentingan kelompok identitas lain. Misalnya isu agama, suku, dan kedaerahan. Sejauh penelitian yang penulis lakukan, isu bawaan di Kecamatan Ciomas ini berlaku baku hanya kepada konteks keagamaan. Dimana warga hanya ingin memilih caleg yang beragama Muslim. Namun, dalam konteks kedaerahan atau primordialisme warga sudah mulai sangat terbuka.

Sementara itu, isu-isu teknis yang utama adalah isu-isu yang berkaitan dengan berbagai masalah yang berlaku bagi semua warga terlepas dari kelompok-kelompok identitas sosial atau kulturalnya. Isu-isu itu bersifat rasional serta dapat dipertukarkan atau bersifat transaksional. Misalnya, isu yang berkaitan dengan

¹³⁵ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 319.

¹³⁶ Mujani, *Kuasa Rakyat*, 320-321

masalah sembilan kebutuhan pokok (sembako). Semua warga butuh sembako, terlepas dari latar belakang identitas sosial atau budayanya. Orang Islam atau non-muslim, orang Jawa Atau diluar jawa, orang NU atau orang Muhammadiyah dan seterusnya, butuh makan, minum, pakaian, perumahan, dan sebagainya.

Latar belakang masyarakat Ciomas yang mayoritas adalah petani tentu memiliki harapan besar bagi kemajuan daerahnya. Untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan ekonomi para petani tentu harus di dukung oleh sarana prasarana pertanian dan infrastruktur yang baik. Dalam pandangan warga Ciomas, Yandri merupakan sosok yang sangat peduli terhadap kebutuhan mereka khususnya dalam hal pertanian dengan banyak terjun langsung membantu segala persoalan yang berkaitan dengan pertanian.

Pemilih rasional dalam budaya demokrasi terdapat beberapa karakteristik. *Pertama*, saling percaya. *Kedua*, jaringan keterlibatan warga yang bersifat sekuler. *Ketiga*, toleransi politik. *keempat*, keterlibatan politik muncul dari kelestarian kepada politik dan semacamnya. *Kelima*, kepercayaan kepada institusi politik dengan rela menjalin semua proses politik demokratis. *Keenam*, kepuasan dalam kinerja demokrasi. *Ketujuh*, dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi di manifestasikan dalam bentuk sikap. *Kedelapan*, dukungan terhadap komunitas politik. batas akhirnya adalah kepuasan warga negara setinggi-tingginya, namun jika tidak tercapai maka anarki dan kediktatoran akan hadir dan mengancam.¹³⁷

Meskipun karakteristik ini tidak kemudian dapat tercitrakan secara utuh pada masyarakat Ciomas, setidaknya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemilihan umum terefleksi dari bagaimana mereka berpartisipasi dalam pemilu khususnya pada pileg 2014 yang lalu.

B. Faktor Penentu Keterpilihan Yandri Susanto

Di Kecamatan Ciomas kelompok sosial dan keagamaanlah yang mampu menggerakkan masyarakatnya untuk dapat berperan aktif pada Pileg 2014 yang

¹³⁷ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, 87.

lalu. Siapa yang mampu merangkul kelompok keagamaan, kelompok pertanian, kelompok primordial dan perkumpulan sosial kemasyarakatan, maka dialah kelak yang akan dipilih. Belakangan diketahui bahwa masyarakat justru tidak membutuhkan embel-embel partai politik. karena faktanya mereka lebih mempertimbangkan aspek figur dalam menentukan pilihan politik.

Pada buku Pemilu Indonesia yang diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dinyatakan bahwa partai politik kini kian tak mengakar. Identifikasi masyarakat terhadap partai politik meluncur jatuh. Alhasil, pemilih mengambang (*floating voter*) semakin melambung.¹³⁸ Hal inilah yang juga berlaku bagi masyarakat Ciomas dimana mereka menganggap bahwa alasan untuk mereka memilih lebih didominasi oleh alasan figur bukan partai.

Kultur yang terbangun di Kecamatan Ciomas masih jauh dari citra modernisme yang kerap digambarkan dengan suatu kumpulan masyarakat yang sebagian besar orangnya mempunyai suatu nilai budaya yang mengedepankan ke kehidupan dalam perkembangan dunia masa kini. Akan tetapi, peran yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Ciomas adalah tentang modernisme yang masih banyak belum mereka ketahui. Oleh sebab itulah ketika dikaitkan dengan pilihan politik mereka akan melihat preferensi politik para tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan/ulama.

Kepatuhan terhadap ulama di tubuh NU sangat besar pengaruhnya dalam penampilan politik para anggotanya, terbukti kharisma ulama telah membawa NU saat bergabung dengan Masyumi mendapat jumlah suara besar. Menyadari besarnya organisasi ini di dasarkan pada para ulama dapatlah dikatakan bahwa politik resmi warga NU sama sekali tidak terlepas dari ulama yang memberikan intepretasi lewat kacamata dan tradisi, bahkan pilihan politik seorang warga Nahdliyin belum sebenarnya jika belum mendapat legitimasi dari para ulama.¹³⁹

¹³⁸ Harun Husein, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, (Jakarta: Perludem, 2014), 312-313.

¹³⁹ Slamet Effendy Yusuf dkk, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergolakan NU*, (Jakarta : CV Rajawali, 1983), 154.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, ulama merupakan komunikator yang handal dengan dasar kredibilitas kharismatik yang melekat pada eksistensi kehidupannya, keputusan dari pendapatnya sering menjadi rujukan dari setiap masalah agama bahkan juga sosial. sosok seorang ulama dapat dinilai sebagai makelar budaya, artinya dalam setiap tindakannya memberi penjelasan atau sebagai penyaring dari datangnya informasi dengan cara menularkan apa yang berguna dan membuang apa yang merusak umatnya. Sebagai aktor komunikasi terdapat peran-peran dalam perubahan sosial. selain menjadi pemangku hukum agama yang mengatur hubungan antara individu dan Tuhan (*hablu-minallah*), ulama juga mengatur hubungan sosial (*hablu-minannas*).¹⁴⁰

Selanjutnya, melihat kondisi kultur masyarakat Ciomas yang tradisional dan memiliki pola komunikasi yang hierarkis, Yandri sebagai seorang calon legislatif yang memiliki berbagai instrumen terutama latarbelakang keluarga dari istrinya yang merupakan tokoh keagamaan Nahdlatul Ulama di Provinsi Banten, memiliki basis komunikasi politik yang jelas.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana Yandri Susanto mampu memberikan kesan yang baik di setiap kesempatannya hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, dengan menggunakan pendekatan psikologis, ketertarikan masyarakat terhadap figur politik dalam konteks keterpilihan Yandri pada Dapil ini menjadi salah satu faktor penentu keterpilihannya bersamaan dengan latar belakang keluarga istrinya yang memiliki basis komunikasi keagamaan NU yang mengakar.

¹⁴⁰ Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 195-197.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Daerah Pemilihan (Dapil) II Banten merupakan daerah yang memiliki pengalaman dalam memberikan ruang untuk Calon Legislatif (Caleg) yang berasal dari luar daerah dapat terpilih pada dapil ini. Setidaknya fenomena itu diperlihatkan pada dua periode pemilihan umum legislatif belakangan yakni pada Pileg 2009 dan Pileg 2014.

Sebagai calon legislatif yang berasal dari luar daerah Banten, Yandri Susanto tampil sebagai Caleg dengan perolehan suara terbanyak pada dapil ini. Yandri yang merupakan kader dari Partai Amanat Nasional sebelumnya banyak di terpa isu miring soal latar belakang politiknya. Misalnya isu tentang PAN yang merupakan “partainya Muhammadiyah” dan ia adalah sosok yang anti dengan kegiatan-kegiatan *ala* NU.

Selanjutnya adalah bagaimana kemudian perilaku warga Dapil II Banten khususnya di Kecamatan Ciomas ini dapat menerima kehadiran sosok Yandri yang notabene-nya adalah seseorang yang berasal dan besar dari daerah Bengkulu, bukan Banten. Salah satu alasan kuatnya adalah bahwa ia menikah dan membina keluarganya dengan putri dari salah satu tokoh ulama NU dan Ketua Fatayat NU di Banten. itulah salah satu awal modal sosial yang dibangun.

Namun, modal sosial awal tersebut diatas tidak lantas membuatnya dapat mendulang suara terbanyak dengan mudah dan membuatnya terpilih menjadi anggota DPR RI pada dapil ini. Dengan menggunakan tiga pendekatan dalam perilaku politik, sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional, ditemukan bahwasanya diantara ketiga pendekatan tersebut ada keterkaitan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa keterpilihan Yandri Susanto disebabkan karena dirinya telah dinilai masyarakat sebagai individu yang telah

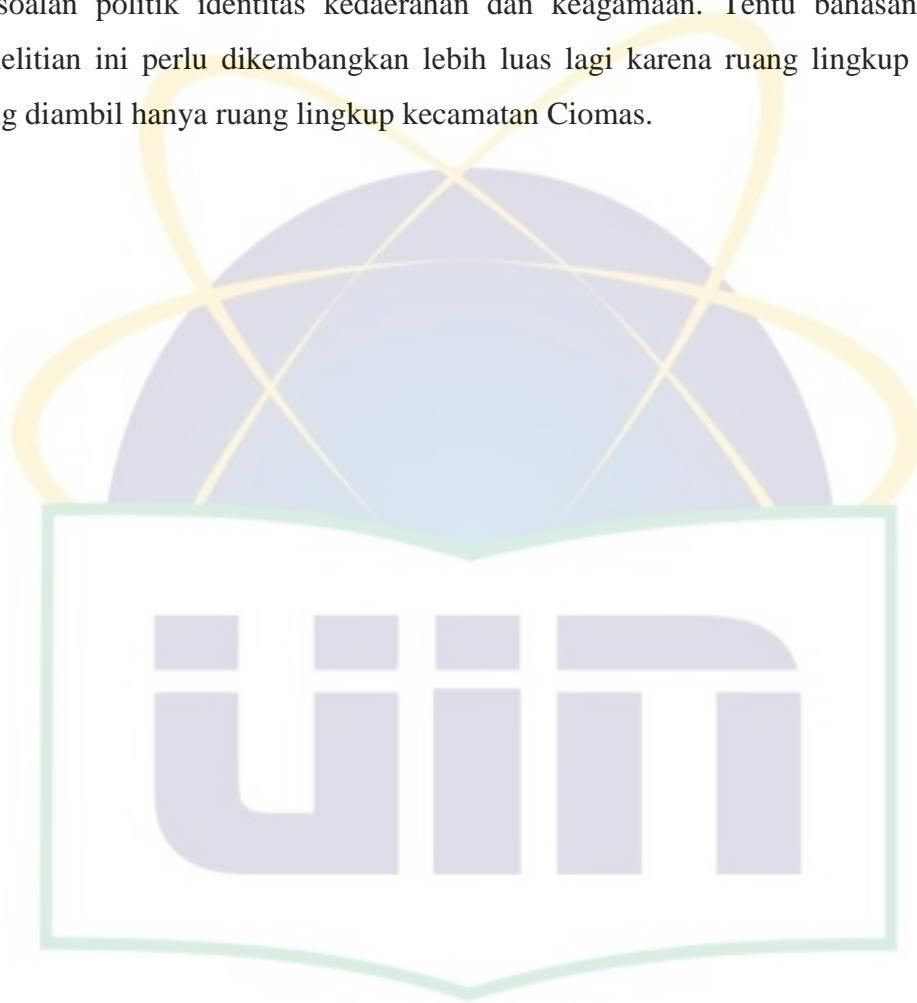
diterima dari segi latar belakang tempat dimana ia tinggal, dimana dirinya dan keluarganya berdomisil di Kota Serang. Faktor keagamaan juga menjadi pertimbangan masyarakat Ciomas dalam menentukan pilihan politik. Yandri yang juga diperkenalkan oleh ketokohan keluarga dari istrinya yang memiliki latar belakang keluarga NU telah berhasil merepresentasikan tradisi keagamaan ala NU dengan baik, kendatipun dirinya berasal dari partai yang di identifikasikan dengan ormas keagamaan Muhammadiyah. Sehingga, warga pemilih merasa Yandri telah menjadi bagian kuat dari kultur dan struktur sosial yang ada di masyarakat setempat.

Pendekatan psikologis merupakan penentu kuat dari bagaimana Yandri Susanto dapat mendulang suara terbanyak di Kecamatan Ciomas khususnya pada bagian dimana pemilih melihat sosoknya dari isu yang berkembang tentang dirinya dan dari sosok Yandri secara *personal*. Namun, pada saat yang bersamaan tantangan yang muncul justru datang dari partai dimana ia di usung dan sekaligus menjadi kendaraan politiknya. Akan tetapi, hal tersebut mampu dijawab oleh bagaimana masyarakat memiliki ketertarikan secara khusus kepada figur Yandri sekaligus pada saat bersamaan ia berhasil menjawab isu negatif yang menimpa dirinya dengan baik.

Pendekatan *rational choice* merupakan instrumen dimana Yandri mampu meyakinkan warga pemilihnya bahwa pihaknya mampu memberikan dampak positif terkait kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2013 dirinya banyak berperan membantu dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat khususnya dalam dunia perekonomian Yandri kerap memberikan perhatian khusus kepada para petani demi kelancaran kegiatan pertanian di Ciomas. Selain itu Yandri juga kerap membantu komunikasi berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang faktor keterpilihan Yandri Susanto pada Pileg tahun 2014 sebagai anggota DPR RI yang memiliki latar belakang non putra daerah di Dapil II Banten. Penelitian diharapkan mampu menjadi salah satu referensi terkait perilaku politik warga pemilih khususnya berkaitan dengan persoalan politik identitas kedaerahan dan keagamaan. Tentu bahasan dalam penelitian ini perlu dikembangkan lebih luas lagi karena ruang lingkup sampel yang diambil hanya ruang lingkup kecamatan Ciomas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, Syamsir dan Jaenal Aripin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Bell, Catherine. *Ritual Theory, Ritual Practice*. Oxford : Oxford University, 1992.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Campbell, Angus, GERAL Gurin, dan Warren E. Miller. *The Voter Decides*. (Evanston, 1954).
- Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller, dan Donald E. Stokes et al. *The American Voter*. New York: Tubingen, 1960.
- Darmawan, Ikhsan. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Downs, Anthony. *Okonomische Theorie der Demokratie, engl: An Economic Theory of Democracy 1957*. New York: Tubingen, 1968.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Hakim, Muhammad Aziz. *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*. Jakarta: Tesis UI, 2012.
- Harsojo. *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Banacipta, 1984.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Husein, Harun. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem, 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Isre, Moh. Soleh. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

- Janda, Kenneth, Jeffry M. Berry, Jerry Goldman, dan Kevin W. Hula. *Study Guide: The Challenge of Democracy*. Boston: Wadsworth, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ketiga). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Labolo, Dr. Muhadam & Teguh Ilham, S.Stp. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015.
- Lazarsfeld, Paul F, Bernard Berelson, & Hazel Gaudet. *The People Choice. How The Voters Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Tubingen, 1944.
- Lidle, R. William. *Partisipasi & Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta : PT Temprint, 1992.
- Lipset, Seymour Martin. *Some Social Requisties of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*. American Political Science Review, No. 53, 1959.
- Mahadi, Helmi dan Shohifullah. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011. Terjemahan dari Marsh, David dan Gerry Stoker (ed.). *Theory and Mthods in Political Science*. Newyork: Palgrave Macmillan, 2002.
- Mariana, Dede & Caroline Paskarina. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 1999.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mufti, Muslim. *Teori-Teori Politik*,. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Muhtadi, Asep Saiful. *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mujani, Saiful. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Mizan Publika, 2011.
- Niemi, Richard G. and Herbert F. Weisberg. *Controversies of Voting Behavior*.

- Washington D.C : Division of Congressional Quarterly Inc., 1984.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: CV. Remaja Karya, 2008.
- Prihatmojo, Joko J. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP3i, 2003.
- Rabi'ah, Rumidan. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Renolds, Andrew. *Merancang Sistem Pemilihan Umum*, dalam Juan J. Linz, dkk, *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan, 2001.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Roth, Dieter. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: LSI, 2009.
- Rozali, Abdullah. *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sahid, Komarudin. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sastriatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Setiadi, Elly M & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.
- Srijanti, dkk. *Etika Berwarganegara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Subagyo, Firman. *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS, 2009.
- Sulastomo. *Democracy atau Democrazy*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Supranto, J. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana

- Indonesia, 1992.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015.
- Ubaidillah, A, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. (Jakarta : IAIN Press, 2000).
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wahid, Salahuddin, dkk. *Menggagas NU Masa Depan*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2010.
- Yusuf, Slamet Effendy, dkk. *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergolakan NU*. Jakarta : CV Rajawali, 1983.

WAWANCARA

- Wawancara bersama H. Yandri Susanto, pada tanggal 19 Februari 2018.
- Wawancara bersama Matlaul Hidayat (warga pemilih Yandri Susanto), pada tanggal 20 Februari 2018.
- Wawancara bersama H. Muhammad Suharja (Tokoh Agama), pada tanggal 19 Februari 2018.
- Wawancara bersama Taufik Rohman (Kepala Staf Pemerintahan Kecamatan Ciomas), pada tanggal 20 Februari 2018.
- Wawancara bersama Haris Munandar (Warga Desa Pondok Kahuru), pada tanggal 20 Februari 2018.

JURNAL DAN PENELITIAN

- Jurnal Aspirasi, *Prilaku Politik di Indonesia*, Vol.1/No.2/Februari 2011.
- Agus Setianto Widodo, “Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih dalam Dinamika Pemilu 2009”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.12/No.3/Maret 2009, hal.382 [jurnal on-line]; tersedia di <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10976>; internet; diunduh pada 13 Maret 2018.
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPPR) Sulawesi Selatan, “Laporan Riset Perilaku Pemilih di Kabupaten Barru”, 2015, hal. 14. [jurnal on-

line]; tersedia di

www.kpu.go.id/koleksigambar/perilaku_memilih_baru_sulsel.pdf; di

unduh pada 05 Maret 2018.

Ayatullah Homeini, *Identitas Budaya Masyarakat Ciomas Banten*, (el-Harokah Vol 17 No. 2 Tahun 2015)

SKRIPSI

Muhammad Ferdiansyah Zidni, “Perilaku Pemilih : Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama pada Pemilihan Umum Gubernur DKI 2012”, Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

Ahmad Ilham Zubairi, “Perilaku Politik Warga Nahdliyin: Studi Kasus Ketidakterpilihannya Kader NU di Pemilukada Kabupaten Lamongan 2010”, Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Benny Nugraha, “Perilaku Memilih Kepala Daerah bagi Masyarakat di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung” Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, (2006).

INTERNET

“Hasyim Muzadi Kumpulkan 500 Tokoh Nu di Al Hikam”, okezone.com, 28 Agustus 2014.

Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan II Banten kpu.go.id. diakses pada 07 Januari 2018.

<http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef876> di akses pada tanggal 07 Maret 2018.

<http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef876> diakses pada 09 Januari 2018.

<http://www.dpr.go.id/anggota/detail/id/918> di akses pada 24 Januari 2018.

<https://tirto.id/m/yandri-susanto-mf> di akses pada 24 Januari 2018.

Kabar-Banten.com/news/detail/18973 diakses pada 09 Januari 2018

Library.uinsby.ac.id/index.php/news-and-events/604-relasi-pan-dan-muhammadiyah diakses pada 07 Januari 2018.

“Minim, Caleg Asli Dapil”, Kompas.com, Jumat 21 Juni 2013.

m.satuharapan.com/index.php?id=148&tx_ttnews%25Btt_news%255D=12904 diakses pada 09 Januari 2018.

“Peta Kekuatan Caleg 2014 Dapil Banten II”, vivanews.com, Jumat 28 Maret 2014.

Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef6fd diakses pada 09 Januari 2018.

Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef757 diakses pada 09 Januari 2018.

Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef7ae diakses pada 09 Januari 2018.

Wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac8ef891 diakses pada 09 Januari 2018.

www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_11_14_02_09_42_16.%20banten.pdf diakses pada 09 Januari 2018.

LAIN-LAIN

Data Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia.

